

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN TUGAS BIDANG BINA MARGA DI DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM
PEMELIHARAAN JALAN KOTA TEMBILAHAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



**Sri Ratna Putri
NPM : 177110042**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU**

2021

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Kota Tembilahan”** ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab per bab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

2. Bapak Dr.Syahrul Akmal Latif., M.Si selaku Dekan FISIPOL Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani ,S.Sos.,M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik dan jajaran Dosen pada jurusan Administrasi Publik yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Hendry Andry.,S.Sos.,M.Si selaku Pembimbing yang telah yang telah menyediakan waktu dan membagi pengetahuan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini terhadap apa yang telah di arahkan dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
5. Terkhusus dan istimewa ucapan terimakasih yang tiada hingga penulis persembahkan kepada ayahanda Basyiruddin, Ibunda Zurwati yang selalu memberikan semangat, limpahan kasih sayang yang tiada henti dan selalu memberikan do'a serta dukungan baik secara moril dan materil kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017 jurusan Administrasi Publik terutama kelas Administrasi Publik B yang telah memberikan dukungan kepada saya.

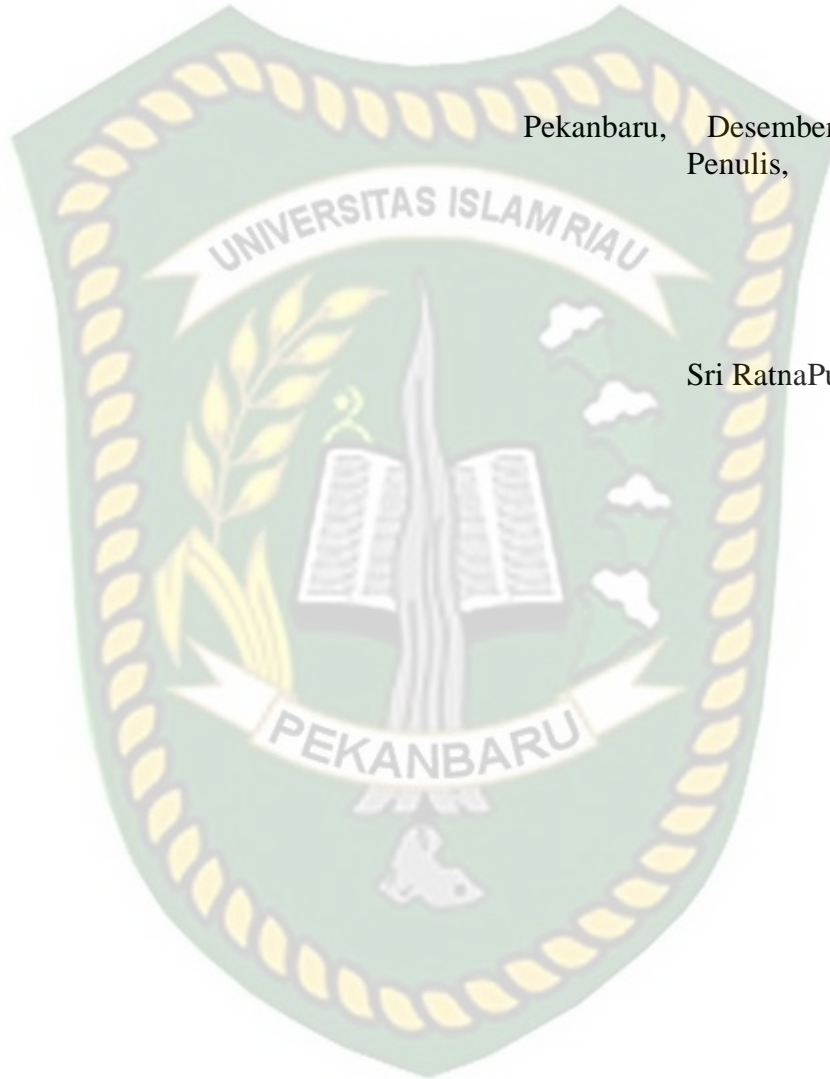
Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal, Aamiin.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa.

Pekanbaru, Desember 2021

Penulis,

Sri RatnaPutri



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA KONFREHENSIF.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
SURAT PERNYATAAN	xvii
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	20
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR.....	22
A. Studi Kepustakaan	22
1. Konsep Administrasi.....	22
2. Konsep Organisasi	27
3. Konsep Manajemen.....	29
4. Konsep Pelaksanaan.....	34
5. Konsep Jalan	35
6. Konsep Pemeliharaan.....	37
7. Konsep Pengawasan.....	38
B. Kerangka Pikir	43
C. Hipotesis	44

D. Konsep Operasional.....	44
E. Operasionalisasi Variabel	46
F. Teknik Pengukuran	48
BAB III: METODE PENELITIAN.....	51
A. Tipe Penelitian	51
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Populasi dan Sampel	52
D. Teknik Penarikan Sampel	55
E. Jenis dan Sumber Data.....	55
F. Teknik Pengumpulan Data.....	56
G. Teknik Analisis Data	57
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	58
BAB IV: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	59
A. Gambaran Lokasi Penelitian.....	59
B. Gambaran Singkat Tentang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir.....	63
C. Struktur Organisasi	64
BAB V: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	69
B. Hasil Dan Pembahasan Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan kota Tembilahan.....	75
BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR KEPUSTAKAAN	109

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
I.2	: Data Rencana Program dan Kegiatan Perbaikan Jalan Kabupaten Indragiri Hilir.....	10
I.3	: Penentuan Program Penanganan Pemeliharaan	16
1.4	: Data Jalan Rusak Di kabupaten Indragiri Hilir (Kota Tembilahan 2020).....	18
III.1	: Data Populasi Dan Sampel Di Dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hilir	52
III.2	: Populasi Dan Sampel Penelitian Masyarakat Dan Pengguna Jalan Di Kota Tembilahan.....	53
III.3	: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian Pelaksanaan Tugas DPUPR Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2020-2021.....	58
IV.1	: Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Kecamatan Tahun 2015.....	62
V.1	: Identitas Responden Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	70

V.2	: Identitas Responden Masyarakat Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	71
V.3	: Identitas Responden Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	72
V.4	: Identitas Responden Masyarakat Berdasarkan Jenis Kelamin.....	72
V.5	: Identitas Responden Pegawai Berdasarkan Umur.....	73
V.6	: Identitas Responden Masyarakat Berdasarkan Umur.....	73
V.7	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pada Bidang Bina Marga) dari Indikator Melaksanakan Semua Rencana.....	75
V.8	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pada Bidang Bina Marga) dari Indikator Melaksanakan Semua Rencana.....	77
V.9	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pada Bidang Bina Marga) Dari Indikator Kebijakan Yang Telah Dirumuskan Dan Ditetapkan.....	80

V.10	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pada Bidang Bina Marga) Dari Indikator Kebijakan Yang Telah Dirumuskan Dan Ditetapkan.....	82
V.11	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pada Bidang Bina Marga) Dari Indikator Melengkapi Alat-Alat yang DiPerlukan.....	86
V.12	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pada Bidang Bina Marga) Dari Indikator Melengkapi Alat-alat Yang Diperlukan.....	88
V.13	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pada Bidang Bina Marga) Dari Indikator Siapa Yang Akan Melaksanakan.....	90
V.14	: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pada Bidang Bina	

	Marga) Dari Indikator Siapa Yang Akan Melaksanakan.....	92
V.15	: Rekapitulasi Jaaban Responden Pegawai Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Dikabupaten Indragiri Hilir (Studipada Bidang Bina Marga).....	95
V.16	: Rekapitulasi Jaaban Responden Masyarakat Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Dikabupaten Indragiri Hilir (Studipada Bidang Bina Marga).....	99

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
I.1	: Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir	43
V.1	: Struktur Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir.....	64



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fisipol UIR Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi Sri Ratna Putri
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Indragiri Hilir, Perihal Izin Penelitian Sri Ratna Putri
- Lampiran 5 : Surat Pernyataan Melakukan Penelitian Dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir, perihal izin penelitian Sri ratnaPutri.

SURAT PERNYATAAN

Nama : Sri Ratna Putri
NPM : 177110042
Program Studi : Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pada Bidang Bina Marga)

Atas naskah yang didaftarkan pada Ujian Komprehensi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan pernyataan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan Universitas serta ukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Desember 2021
Yang Menyatakan, █

Sri Ratna Putri

**PELAKSANAAN TUGAS BIDANG BINA MARGA DI DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM
PEMELIHARAAN JALAN KOTA TEMBILAHAN**

ABSTRAK

SRI RATNA PUTRI

177110042

Kata kunci: Pelaksanaan, Tugas, Pemeliharaan Jalan, Dinas pupr

Jalan merupakan prasarana yang sangat penting bagi kebutuhan masyarakat. Kerusakan jalan dapat berdampak mengganggu kondisi sosial maupun ekonomi masyarakat. Penelitian ini dilakukan di kabupaten Indragiri Hilir, Kota Tembilahan. Dan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Indragiri Hilir dalam pemeliharaan jalan kabupaten Indragiri Hilir khususnya kota Tembilahan, serta untuk mengetahui kendala dalam kegiatan pemeliharaan jalan. Dikarenakan masih banyaknya jalan rusak di kota Tembilahan yang perlu segera ditangani. Tipe penelitian ini menggunakan survey deskriptif dengan metode kuantitatif. Jenis data dan sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data observasi, angket, wawancara, dan dokumentasi serta teori yang digunakan yaitu pelaksanaan. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan tugas bidang bina marga di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan kota Tembilahan berada pada interval “cukup terlaksana”. Pada rentang 34%-67% dengan persentase 43%, artinya pelaksanaan tugas pekerjaan umum dan penataan ruang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik walaupun masih belum optimal. Hasil tersebut dapat dilihat dari empat indikator yang penulis paparkan yaitu, melaksanakan semua rencana, dilihat dari item penilaian dinas pekerjaan umum dan penataan ruang selalu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan seperti perbaikan dan perawatan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap mampu melayani lalu lintas sehingga rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, yang mana pihak-pihak yang ikut serta dalam pemeliharaan jalan, maupun yang ikut terkait dalam pemeliharaan jalan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas dan keajibannya masing-masing. Melengkapi alat-alat yang diperlukan, yang mana masih kurangnya alat-alat dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan. Dan siapa yang melaksanakan, dimana masih kurangnya tenaga ahli jalan yaitu ahli geodesi, dan team leader yang melakukan pemeliharaan jalan dan arahan terhadap personil kerja.

**IMPLEMENTATION OF THE TASKS OF THE CLAN DEVELOPMENT
FIELD IN THE PUBLIK WORKS AND SPATIAL PLANNING
DEPARTMENT IN THE MAINTENANCE OF TEMBILAHAN CITI ROADS**

ABSTRACT

SRI RATNA PUTRI

177110042

Keywords: Implementation, Tasks, Road Maintenance, Department of Public Works

Roads are a very important infrastructure for the needs of the community. Road damage can have an impact on disturbing the social and economic conditions of the community. Study. This research was conducted in the downstream Indragiri district, Tembilahan city. And aims to find out the implementation of the tasks of the public works and spatial planning department of the downstream Indragiri district in the maintenance of roads in the downstream Indragiri district, especially the Tembilahan city, as well as to find out the obstacles in road maintenance activities. Because there are still many damaged roads in Tembilahan city that need to be addressed immediately. This type of research uses a descriptive survey with quantitative methods. Types of data and data sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques are observation, questionnaires, interviews, and documentation as well as the theory used is implementation. So it can be concluded that the implementation of the duties of the public works department and spatial planning in road maintenance in the city of Tembilahan (study in the field of binamarga) is in the "fairly implemented" interval. In the range of 34%-67% with a percentage of 43%, it means that the implementation of public works and spatial planning tasks has carried out its duties well although it is still not optimal. These results can be seen from the four indicators that the authors describe, namely, carrying out all plans, seen from the assessment items of the public works and spatial planning department, always setting goals and actions to be taken such as repairs and maintenance needed to maintain road conditions so that they are able to serve traffic. so that the set plan can be achieved. the policies that have been formulated and determined, in which the parties participating in road maintenance, as well as those involved in road maintenance have been carried out properly in accordance with their respective duties and responsibilities. complete the necessary tools, which still lack the tools of the public works service and spatial planning in road maintenance. and who does it, where there is still a lack of road experts, namely geodesy experts, and team leaders who carry out road maintenance and directives to work personnel.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Administrasi merupakan suatu proses kerjasama, aktivitas dilakukan didalam suatu komponen diawali menetapkan suatu kebijakan dimana kebijakan tersebut dilaksanakan dengan proses kerjasama dan saling berkaitan dalam mencapai suatu tujuan yang diinginkan.

Dalam pelaksanaan administrasi, organisasi merupakan suatu tempat dimana administrasi dijalankan sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Organisasi merupakan bentuk formal dari sekelompok manusia dengan tujuan individualnya masing-masing yang bekerja sama dalam suatu proses tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan organisasi dapat tercapai secara selaras dan harmonis maka diperlukan kerjasama dan usaha yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak untuk bersama-sama berusaha saling memenuhi kewajiban masing-masing secara bertanggung jawab. Apabila sebuah organisasi supaya tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan, adapun ilmu atau strategi terdapat dalam konsep manajemen, yang mana manajemen merupakan suatu usaha atau upaya dalam pencapaian sebuah tujuan dengan cara mendayagunakan dan juga mengoptimalkan bantuan atas kemampuan orang lain untuk melakukan aktivitas pencapaian tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya oleh sebuah organisasi.

Suatu organisasi akan berjalan dengan baik dan lancar dalam mencapai tujuan jika didukung dengan berbagai potensi, dan juga pengelolaan sumber daya-sumber daya organisasi secara benar.

Manajemen meliputi kegiatan untuk mencapai tujuan, dilaksanakan oleh individu-individu yang menyumbangkan usahanya yang terbaik melalui tindakan yang ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan cara melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengatur ketetapan dari tindakan-tindakan.

Jalan merupakan prasarana yang penting bagi kehidupan masyarakat. Kerusakan jalan dapat berdampak mengganggu kondisi ekonomi maupun sosial masyarakat. Hal ini termasuk dalam undang-undang no 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah masing-masing daerah diberikan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan agar pemerintah daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan hasil guna pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Selanjutnya didalam peraturan dalam Mentridental Negeri nomor 106 tahun 2017 tentang pedoman nonmenlakur perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintah dibidang perkerjaan umum dan tata ruang. Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melaksanakan roda pemerintahnya menganut azas desentralisasi, dekonstrasi dan tugas pembantu yang telah diatur dala undang-undang no 23 tahun 2014. Tentang pemerintah daerah masing-masing daerah diberikan otonomi seluas-luasnya dengan tujuan agar perintah daerah yang

bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan hasil guna pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.

Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dengan demikian, proses pembangunan terjadi disemua aspek kehidupan masyarakat, ekonomi, sosial, budaya, politik. Makna penting dari pembangunan adalah adanya kemajuan atau perbaikan (progress).

Negara Republik Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk republic dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, sejahtera dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai salah satu Negara yang sedang berkembang dan sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, Indonesia tetap melaksanakan pembangunan nasional secara terencana, menyeluruh, terarah dan berkelanjutan untuk memacu peningkatan kemampuan nasional, dalam rangka mewujudkan kehidupan sejajar dan sederajat dengan bangsa yang telah lebih maju.

Salah satu urusan disebutkan daerah provinsi Riau adalah Pekerjaan Umum dan penataan Ruang, yang terkait dengan luas kabupaten maka pemerintah di daerah provinsi Riau telah menetapkan beberapa tugas dan wewenang Dinas.

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan peraturan Gubernur Riau Nomor 36 tahun 2009 tentang uraian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada bagian dibidang Bina Marga yaitu

Tugas dari dinas pekerjaan umum dan penataan ruang pada bagian bidang bina marga yaitu bina marga adalah unsur pelaksanaan dari dinas pekerjaan umum. Kepala bidang bina marga melaksanakan tugas menyelenggarakan penanganan prasarana jalan dan jembatan beserta utilitasnya. Kepala bidang bina marga berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas.

Bina Marga telah memberikan petunjuk teknis tentang perencanaan dan penyusunan program jalan kabupaten (SK.77/KPTS/Db/1990). Buku tersebut mencakup prosedur perencanaan umum dan penyusunan program untuk pekerjaan berat (rehabilitas, peningkatan) dan pekerjaan ringan terutama pemeliharaan) pada jalan dan jembatan kabupaten, pada umumnya diklasifikasikan fungsinya sebagai jalan 'lokal', prosedur perencanaan ini dimaksudkan untuk dilaksanakan setiap tahun. Buku tersebut dibagi atas 2 bagian:

- Bagian A, berisi garis besar dan tujuan dari prosedur disertai dengan informasi mengenai pembagian waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaannya.
- Bagian B, berisi rincian prosedur survey yang terdiri dari 32 komponen tugas, dibagi dalam 5 kelompok tugas, yaitu:
 1. Kaji ulang dan pemutahiran database
 2. Survey
 3. Analisis biaya
 4. Penarikan biaya persiapan
 5. Program tahunan

Adapun tugas dari bidang bina marga yaitu

- a. Penyusunan program kerja
- b. Mengkoordinasikan perencanaan, pemeliharaan, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan
- c. Pembinaan dan perumusan pengembangan industri jalan dan jembatan.
- d. Melakukan pengawasan, peningkatan rehabilitasi dan pemeliharaan jalan dan jembatan
- e. Pemberian bimbingan terhadap pemakaian jasa konsultan dan jasa konstruksi, dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya.
- f. Pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi pengaturan dan pemberian perizinan.

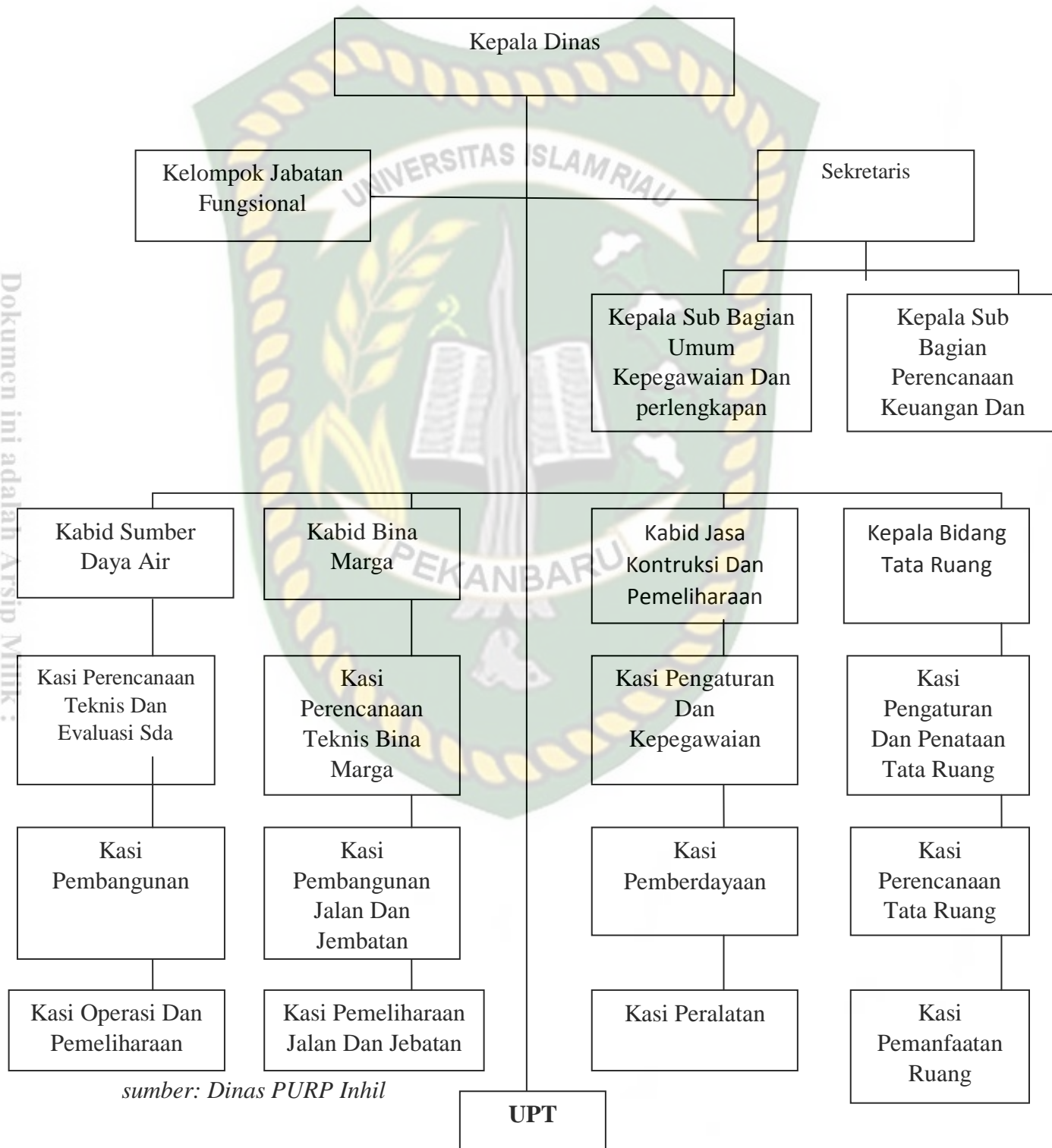
Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut, kewenangan dalam hal masalah jalan dan pemeliharaan jalan merupakan kewenangan dari dinas pekerjaan umum dan penataan ruang pada kabupaten Indragiri hilir khususnya yaitu pada bidang bina marga.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka pemerintah mewujudkan dengan melaksanakan pembangunan-pembangunan baik dalam bidang fasilitas umum dan sarana prasarana, dan dalam rangka eektivitas pelaksanaan pembangunan disegala bidang demitercapainya keselarasan dan keseimbangan seluruh kegiatan pembangunan, maka diperlukan pemerataan pembangunan.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, kabupaten Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah otonom dituntut untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang dalam penelitian ini di fokuskan pada pemeliharaan jalan sebagai tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. Pemerintah daerah kabupaten Indragiri Hilir sebagai realisasi dari proses manajemen ini dibentuk dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang diantaranya yaitu terdiri dari:

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan umum dan penataan

Ruang Kabupaten Indragiri Hilir



Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian
 2. Sub bagian keuangan dan perlengkapan
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pengendalian
- c. Bidang Sumber Daya air
 1. Seksi Irigasi
 2. Seksi Sungai, Rawa, Pantai, dan Danau
 3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan
- d. Bidang Bina Marga
 1. Seksi perencanaan teknis
 2. Seksi pembangunan jalan
 3. Seksi pemeliharaan jalan dan jembatan
- e. Bidang Jasa Konstruksi
 1. Seksi Peralatan
 2. Seksi laboratorium dan pengujian
 3. Seksi pembinaan teknis jasa konstruksi
- f. Bidang Cipta Karya
 1. Seksi pembangunan jaringan air bersih
 2. Seksi sanitasi lingkungan
- g. Bidang Tata Reng dan Bangunan
 1. Seksi tata ruang
 2. Seksi tata bangunan
- h. Bidang Perumahan Dan pemukiman
 1. Seksi Perumahan Rakyat
 2. Seksi penataan lingkungan perumahan dan permukiman

Jalan merupakan prasarana yang sangat penting, bagi kebutuhan hidup masyarakat, kerusakan yang terdapat pada jalan dapat berdampak pula pada kondisi sosial dan ekonomi. Jalan yaitu saran yang sangat penting diperlukan atau dibutuhkan pada masyarakat-masyarakat untuk dalam melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apabila jalan mengalami kerusakan maka akan mengganggu mobilitas masyarakat atau bahkan dapat berdampak yang menghambat kegiatan dan pelayanan pemerintah di daerah setempat.

Jalan ialah sarana transportasi darat yaitu meliputi segala bagian jalan termasuk seperti bangunan yang perlengkapan diperuntukan lalu lintas yang berada diatas permukaan tanah. Berdasarkan status jalan dan beberapa kewenangannya yaitu dikelompokkan menjadi:

1. Jalan Nasional yaitu jalan yang menghubungkan antar ibukota provinsi, jalan tol serta jalan strategis nasional.
2. Jalan provinsi yaitu jalan yang menghubungkan ibu kota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
3. Jalan kabupaten, yaitu jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal dan jalan strategis kabupaten.
4. Jalan kota adalah jalan yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam kota, serta menghubungkan antar permukiman yang berada didalam kota.
5. Jalan desa adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan antar permukiman didalam desa serta jalan lingkungan.

Sementara jaringan jalan adalah satu kesatuan jaringan jalan yang terdiri dari sistem jaringan jaringan primer dan sekunder yang terjalin dalam hubungan hirarki.

- a. Jaringan primer yaitu menghubungkan secara menerus pusat kegiatan nasional, pusat kegiatan wilayah pusat kegiatan lokal sampai ke pusat

kegiatan lingkungan dan menghubungkan antar pusat kegiatan nasional.

- b. Jalan sekunder disusun berdasarkan rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota dan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat dikawasan perkotaan. Yang menghubungkan secara menerus kawasan yang mempunyai fungsi sekunder.

Berdasarkan klasifikasi jalan menurut fungsinya dikelompokkan sebagai berikut.

- a. Jalan arteri: merupakan jalan yang melalui angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisiensi.
- b. Jalan kolektor merupakan jalan yang melayani angkutan pengumpul atau dibagi dengan ciri-ciri pejalan jarak sedang dengan kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- c. Jalan lokal merupakan jalan yang melayani aturan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- d. Jalan lingkungan yaitu jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri pejalan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.

Berdasarkan kelas jalan dapat dikelompokkan yaitu:

- a. Jalan kelas 1: jalan arteri dengan kolektor yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran

panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan sumbu terberat muatan 10 ton.

- b. Jalan kelas II: jalan arteri, kolektor, lokal, lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 12.000 milimeter, ukuran paling tinggi 4.200 milimeter, dan muatan sumbu terberat 8 ton.
- c. Jalan kelas III: jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran tidak lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, ukuran paling tinggi 3.500 milimeter, muatan sumbu terberat 8 ton.
- d. jalan kelas khusus yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang melebihi 18.000 milimeter, dan muatan untuk sumbu terberat lebih dari 10 ton.

Penyelenggaraan jalan dapat dibagi atas 3 bagian yaitu penyelenggaraan nasional, penyelenggaraan jalan kabupaten atau kota dimana sesuai dengan kewenangan penyelenggaraannya masing-masing.

Penyelenggaraan jalan adalah dimana ada pihak yang melakukan peraturan, pengawasan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan sesuai dengan kewenangannya sehingga jalan kota tembilahan merupakan status jalan kota yaitu kewenangannya dari Dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Indragiri hilir.

Masih adanya jalan dikota tembilahan yang dilewati mengalami kerusakan. Seperti pada beberapa jalan dikota tembilahan yang mengalami kerusakan yaitu berupa hancur, berlubang dan bahkan ada jika turun hujan akan menggenangi jalan tersebut sehingga jalan tampak seperti kolam. Namun hal ini masih belum adanya perbaikan dari pemerintah setempat. Akibat kerusakan jalan ini dapat menyebabkan penggunaan jalan mengalami kecelakaan dan juga membuat ketidaknyamanan masyarakat untuk melewati jalan tersebut .

Kerusakan jalan ini diduga dipengaruhi ada beberapa factor yaitu salah satunya kurangnya pengawasan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang terhadap jalan di kota tembilahan, kemudian ada faktor diduga dikarenakan beban kendaraan yang berlebihan yang dilewati berulang-ulang .

Untuk itu mengaktualisasikan pembangunan sarana dan prasarana jalan pemmerintah daerah kabupaten Indragiri hilir mengeluarkan peraturan dalam hal meningkatkan sarana dan prasarana transportasi darat dilingkungan pemerintahan kabupaten Indragiri hilir. Peraturan Bupati Indragiri hilir Nomor 11 tahun 2014 tentang penjabaran tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan ruang kabupaten Indragiri Hilir yaitu pemeliharaan jalan.

Berikut Rencana Program Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir dalam pemeliharaan jalan.

Tabel 1.2: Daftar Rencana Program dan Kegiatan Perbaikan jalan di Kota Tembilahan Tahun 2020-2021

Rencana/Program 2020	Panjang ruas jalan	Kecamatan	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5
Jalan Kartini	400 M	Tembilahan	1.940.000.000	1.910.266.900
Jalan H. Said	900 M	Tembilahan	2.510.000.000	2.470.716.000
Peningkatan Jalan H. Sadri, Jalan Abdul Manaf, Jalan Batang Tuaka	1.720 Km	Tembilahan	9.137.144.000	9.120.544.400
Peningkatan Jalan Ipeda	300 M	Tembilahan	1.810.000.000	1.800.069.610
Pemeliharaan Jalan Pelajar	700 M	Tembilahan	1.750.000.000	1.735.203.650

Kegiatan/Program 2021	Kecamatan	Anggaran
Pemeliharaan rutin swa kelola jalan se-kabupaten inhil	Se-inhil	380.835.000
Peningkatan jalan lingkungan Gg. Pintasan Murni	Tembilahan	60.000.000
Pemeliharaan jalan syarif kasim	Tembilahan	630.000.000

Sumber: Dinas PURP inhil 2020

- Jalan kartini dengan panjang jalan 400 Meter dan anggaran yang disediakan oleh pemerintah kota tembilahan sebesar 1.940.000.000. dan jalan yang terealisasi hanya 310 meter dengan memakai biaya sebesar 1.910.266.900. sisa dari jalan yang belum terealisasi 90 meter lagi. Yang belum terealisasi

dikarenakan factor cuaca yang tidak mendukung pada saat pengerjaan, dan juga karena kondisi tanah yang bergambut.

- Jalan H.Said dengan panjang jalan 900 Meter dana nggaran yang disediakan oleh pemerintah kota tembilahan sebesar 2.510.000.000. dan jalan yang terealisasi hanya 790 meter dengan memakai biaya 2.470.716.000. sisa dari jalan yang belum teralisasi 110 meter. Jalan yang belum teralisasi dikarenakan membutuhkan penambahan dana lagi untuk melanjutkan perbaikan jalan H.said tersebut.
- Jalan H.Sadri dengan panjang ruas jalan 500 meter, jalan Abdul manap 400 meter, jalan Batang tuaka 820 meter, ketiga jalan tersebut sudah teralisasi dengan memakai dana 9.120.544.400 dari anggaran dana yang disediakan sebanyak 9.137.144.000 oleh pemerintah kota tembilahan.
- Jalan Ipeda dengan panjang jalan 300 meter dan anggaran yang disediakan oleh pemerintah kota tembilahan sebesar 1.810.000.000. dan jalan yang terealisasi hanya 275 meter dengan memakai biaya 1.800.069.610. sisa dari jalan yang tidak terealisasi 15 meter lagi, dikarenakan factor tanah gambut.
- Jalan Pelajar dengan panjang jalan 700 meter dan anggaran yang diberikan oleh pemerintah kota tembilahan sebesar 1.750.000.000. dan jalan yang terealisasi hanya 680 meter dengan memakai biaya 1.735.203.650. sisa dari jalan yang belum teralisasi sepanjang 20 meter, dikarenakan kondisi cuaca yang buruk pada saat proses pengerjaan, sehingga menghambat proses pengerjaan jalan yang sedang dikerjakan, sehingga mempengaruhi proses dan kualitas pengerjaan itu sendiri.

Tujuan dari pemeliharaan jalan ialah untuk mempertahankan kondisi jalan mantap sesuai dengan tingkat kemampuan dan pelayanannya pada saat jalan tersebut selesai dibangun dan dioperasikan sampai dengan tercamainya umur rencana jalan yaitu 10-20 tahun .

Dengan demikian pemeliharaan jalan perlu dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Pemeliharaan jalan juga dapat dilakukan secara terus menerus dengan bekesidambungan maupun berkala. Pemeliharaan jalan secara rutin dilakukan secara terus menerus sepanjang tahun dan juga dilakukan sesegera mungkin ketika kerusakan pada jalan yang terjadi sebelum meluas.

Pemeliharaan jalan terbagi menjadi 2 jenis, yakni pemeliharaan rutin dan peeliharaan berkala, yaitu sebagai berikut :

1. Pemeliharaan Rutin Pemeliharaan rutin mencakup pekerjaan-pekerjaan yaitu seperti perbaikan kecil dan pekerjaan rutin, yang umumnya dilaksanakan pada angka waktu tertentu dan sebagaimana dikehendaki .
2. Pemeliharaan berkala Pemeliharaan yang mempunyai frekuensi yang terencana lebih dari satu tahun pada salah satu lokasi dan pemeliharaan yang lebih berat, beberapa jenis pemeliharaan yang termasuk pada pemeliharaan berkala yaitu :

- a. Pembangunan baru

Pembangunan baru yaitu pekerjaan untuk meningkatkan jalan yang semula jalan tanah atau jalan setapak menjadi jalan aspal yang dapat

dilalui kendaraan baik itu roda empat dan memerlukan biaya yang lebih besar.

b. Pekerjaan Rehabilitasi

Pekerjaan rehabilitasi yaitu pekerjaan yang dilakukan bila pekerjaan pemeliharaan yang seharusnya secara tetap dilaksanakan telah diabaikan dan juga terlalu lama ditunda, sehingga keadaan permukaan jalan memburuk. Pembangunan kembali secara keseluruhan biasanya diperlukan bila kerusakan structural sudah tersebar luas sebagai akibat diabaikannya pemeliharaan, kekuatan desain yang tidak sesuai atau umur rencana jalan sudah terlewati .

c. Pekerjaan peningkatan

Pekerjaan peningkatannya itu standar pelayanan dari jalan yang sudah ada, baik dengan membuat lapisan menjadi lebih halus, maupun penambahan lapisan, ataupun pelebaran jalan yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi jalan yang sebelumnya.

Jenis Penanganan Kerusakan Jalan

-Metode Perbaikan Standar

Penanganan kerusakan jalan pada lapisan jalan menggunakan metode perbaikan standar Direktorat Jendral BinaMarga 1995. Jenis-jenis metode penanganan tiap-tiap kerusakan adalah

1. Metode Perbaikan P1 (Penebaran pasir)

- a. Jenis kerusakan yang ditangani: Lokasi-lokasi kegemukan aspal terutama pada tikungan dan tanjak.
- b. Langkah Penanganannya:

- Memobilisasi peralatan, pekerjaan dan material kelapangan.
- Memberikan tanda pada jalan yang akan diperbaiki
- Membersihkan daerah dengan air compressor
- Menebarkan pasir kasar atau agregat halus (tebal > 10 mm) diatas permukaan yang terpengaruh kerusakan
- Melakukan pemadatan dengan pepadaringan (1-2) ton sampai diperoleh permukaan yang rata dan mempunyai kepadatan optimal (kepadatan 90%)

2. Metode perbaikan P2 (Peleburan Aspal Setempat)

a. Jenis kerusakan yang ditangani

- Kerusakan tepi bahu jalan beraspal
- Retak buaya < 2mm
- Retak garis lebar < 2mm
- Terkelupas

b. Langkah Penagannya:

- Memobilisasi peralatan, pekerjaan dan material kelapangan.
- Membersihkan bagian yang akan ditangani dengan air compressor, permukaan jalan harus bersih dan kering
- Menyemprotkan dengan aspal keras sebanyak $1,5 \text{ kg/m}^2$ dan untuk cut back 1 liter/m²
- Menebarkan pasir kasar atau agregat halus 5 mm hingga rata.
- Melakukan pemadatan mesin pneumatic sampai diperoleh permukaan yang rata dan mempunyai kepadatan optimal (kepadatan 95%).

3. Metode Perbaikan P3 (Pelapisan Retakan)

a. Langkah penanganannya:

- Memberikan bagian yang akan ditangani dengan air compressor, sehingga permukaan jalan bersih dan kering
- Menebarkan dan meratakan campuran aspal beton pada seluruh daerah yang telah diberi tanda
- Melakukan pemadatan ringan (1-2) ton sampai diperoleh permukaan yang rata dan kepadatan optimum (kepadatan 95%).

4. Metode Perbaikan P4 (Pengisian Retak)

a. Langkah penanganannya:

- Memobilisasi peralatan, pekerjaan dan material kelapangan.
- Membersihkan bagian yang akan ditangani dengan air compressor, sehingga permukaan jalan bersih dan kering
- Menebarkan pasir kasar pada retakan yang telah diisi aspal (tebal 10 mm). memadatkan minimal 3 lintasan dengan babby roller.

5. Metode perbaikan P5 (penambahan lubang)

a. Langkah penanganannya:

- Menggali material sampai mencapai lapisan dibawahnya
- Membersihkan bagian yang akan ditangani dengan tenaga manusia.
- Menyemprotkan lapis resap pengikat prime coat dengan takaran 0,51 liter/m².
- Menebarkan dan memadatkan campuran aspal beton sampai diperoleh permukaan yang rata.

Tabel 1.3 Penentuan Program Penanganan Pemeliharaan

Kondisi jalan	Persentase Batasan Kerusakan (persent teradap Luas Lapis Permukaan)	Program Penanganan
Baik (B)	<11%	Pemeliharaan Rutin
Rusak ringan (RR)	11<16%	Pemeliharaan rutin/berkala
Rusak sedang (RS)	16<23%	Pemeliharaan rehabilitas
Rusak berat (RB)	>23%	Rekontruksi/ peningkatan struktur

Sumber: DPUPR Indragiri Hilir

Perawatan dan pemeliharaan jalan adalah penting dalam upaya meningkatkan kemampuan dan umur rencana jalan yang mantap untuk melayani lalu lintas dari transportasi darat .

Kerusakan pada jalan dapat terjadi dengan kondisi berbagai macam dan beberapa tingkat kerusakan baik itu berat, sedang ataupun ringan. Saat kondisi kerusakan pada jalan masih ringan diharapkan harus segera bias ditangani dengan cara pemeliharaan rutin agar kerusakan jalan tidak semakin parah, karena apabila kerusakan jalan semakin parah karena biaya perbaikan jalan akan jauh lebih besar apabila tidak segera ditangani, jenis kerusakan yang sering terjadi yaitu retak, berlubang, bergelombang, penurunan/ambblas.

Hal ini penting dalam pemeliharaan jalan, merupakan survey kondisi jalan, petugas pelaksanaan yang mana ikut berperan dalam pemeliharaan jalan, yaitu pelaksanaan pemeliharaan jalan dan pengawasan pemeliharaan jalan.

Dimana survey kondisi jalan yaitu observasi langsung turun kelapangan dengan sekurang-kurangnya 2 orang personil yang ahli dalam melakukan penilaian terhadap kondisi jalan untuk mendapatkan informasi jalan dengan kegiatan mengumpulkan seperti data kerusakan, jenis kerusakan, menghitung kerusakan dengan disertai dokumentasi foto-foto dan merekam video kondisi jalan rusak. Survey kondisi jalan meliputi survey awal dengan mendokumentasikan panjang ruas jalan akan diteliti, survey lintas harian rata-rata, survey kekerasan jalan, untuk mendapatkan informasi kondisi jalan tersebut . Survey dilakukan 2 kali dalam setahun untuk pemuktahiran kondisi jalan.

Survey kondisi jalan meliputi bangunan pelengkap jalan dan survey kondisi jalan yang digunakan untuk jenis penanganan dan digunakan untuk data dasar bagi penelenggara jalan .Survey dilakukan dalam 2 kali setahun. Sehingga informasi dimaksudkan diharapkan dapat menentukan penanganan yang diperlukan dengan tepat, agar hasil dari suatu pekerjaan peeliharaan jalan tidak sia-sia dan berkualitas dengan kebutuhan pemeliharaan jalan sesuai dengan jenis kerusakannya.

Jalan adalah prasarana dasar (basic infrastructure) dimana tanpa didukung ekonomi daerah yang cukup memadai tidak dapat berlangsung, namun ketersediaan dana APBD yang memang terbatas dan pengalaman daerah dalam menyusun anggaran masih mminim, maka kondisi adanya kekurangan dana penanganan untuk jalan tidak dapat dihindari. Hal ini menandakan bahwa sangat diperlukan adanya panduan yang jelas bagi daerah dalam mengalokasikan dana, terutama untuk membiayai pemeliharaan infrastruktur jalan, setidaknya bahwa agar alokasi dana untuk jalan tetap memadai, minimal jalan yang telah ada dapat dipelihara sehingga dapat beroperasi sebagaimana mestinya.

Masih banyaknya jalan di kota tembilahan yang dilewati mengalami kerusakan, yang masih membutuhkan penanganan, hal ini tentunya mengganggu mobilitas social masyarakat, terganggunya pelayanan pemerintah daerah dan juga perekonomian kota tembilahan . Dimana persaingan pasar pada kota tembilahan yang semakin berkebang pesat. Infrastruktur jalan merupakan penghambat yang dominan untuk kebutuhan oleh masyarakat setempat .Adapun kerusakan pada

jalan yaitu rusak ringan seperti retak, rusak sedang seperti berlubang, dan rusak berat yaitu penurunan/amblas.

Berikut ini adalah tabel jalan rusak di kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan tingkat kerusakannya:

Tabel 1.4: Data Jalan Rusak di Kabupaten Indragiri Hilir (Kota Tembilahan) Tahun 2020

No	Nama Jalan	Kecamatan	Panjang Ruas(km)	Rusak ringan (%)	Rusak sedang (%)	Rusak berat (%)
1	Jln. H Sadri	Tembilahan	0,50	60%	20%	
2	Jln. Abdul Manap	Tembilahan	0,40		75%	
3	Jln. Batang Tuaka	Tembilahan	0,82	75%		
4	Jln.Kartini	Tembilahan	0,40	80%		
5	Jln. H said	Tembilahan	0,90	50%		
6	Jln. Ipeda	Tembilahan	0,30	75%		
7	Jln. Pelajar	Tembilahan	0,70	20%	60%	

Sumber: dinas PUPR Kabupaten Indragiri Hilir

Dari tabel tersebut dapat dilihat masih terdapat jalan rusak di kota Tembilahan dengan 7 ruas jalan rusak .untuk kecamatan tembilahan sendiri yang panjang ruas jalan memiliki luas wilayah 197,37 km. dapat diketahui luas seluruh jalan rusak di kota tembilahan yaitu 40,20 km yang membutuhkan penanganan.

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa masih adanya kerusakan jalan, tidak hanya kerusakan sedang, ringan yang ada di kota tembilahan. Untuk itu diperlukan pemeliharaan rutin maupun berkala pada setiap kerusakan yang ada pada kota tembilahan. Pada kegiatan pemeliharaan jalan pihak yang bertanggung jawab ada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang khususnya pada bidang bina marga untuk menjalankan kegiatan pemeliharaan tersebut agar masyarakat dan pengguna jalan dapat merasa nyaman saat melintasi jalan tersebut.

Disini penulis ingin meneliti pada jalan rusak dikota tembilahan yaitu pada jalan. Jalan H. Sadri, Jalan Abdul manap, jalan Batang Tuaka, Jalan kartini jalan H.Said, jalan Ipeda, dan jalan pelajar Dengan demikian jalan dikota tembilahan merupakan wewenang dan tanggung jadi pengawasan pemerintah kabupaten/kota dalam hal ini dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Indragiri hilir, khususnya pada bidang bina marga .

Berdasarkan kondisi yang ada dilapangan maka penulis menemukan beberapa fenomena yaitu:

1. Berdasarkan observasi dilapangan, kurangnya pengawasan oleh dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang khususnya dibidang Bina Marga, karena masih ditemukan beberapa jalan yang rusak dikotatembilahan yaitu seperti jalan Jalan H. Sadri, Jalan Abdul manap, jalan Batang Tuaka, Jalan kartini jalan H.Said, jalan Ipeda, jalan pelajar.

2. Berdasarkan kerusakan yang terjadi beberapa tahun terakhir, belum juga adanya perbaikan, sehingga membuat ketidaknyamanan masyarakat pengguna jalan untuk beraktifitas.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian masalah diatas yang telah dijelaskan. Maka penulis ingin mengangkat dan mengupas mengenai: ‘Bagaimanakah Pelaksanaan TugasDinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kota Tembilahan (Studi Bidang Bina Marga)’.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan tugas oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang pemeliharaan jalan yang dilakukan oleh dinas PURP khususnya pada bidang bina marga .
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas Pekerjaan umum dan penataan ruang dalam melaksanakan pemeliharaan jalan .

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, maka kegunaan peneitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan teoritis

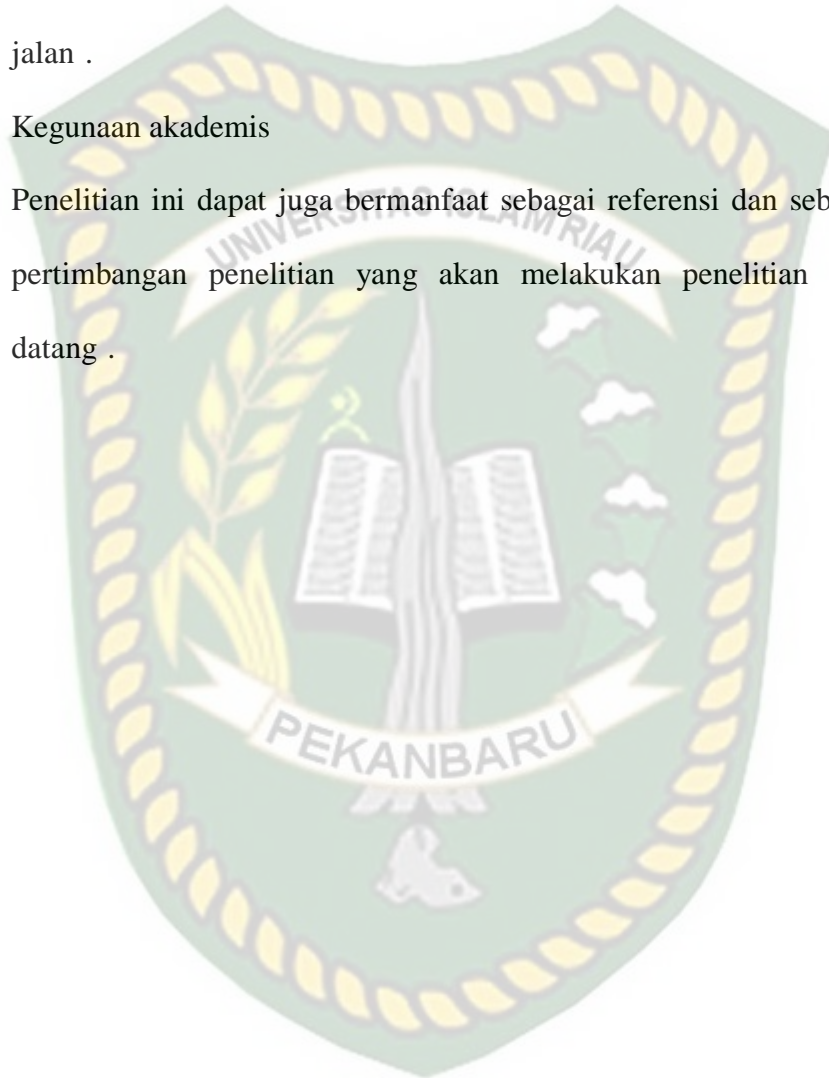
Mengembangkan dan memperkaya pengetahuan serta wawasan penulis tangan pemeliharaan jalan.

b. Kegunaan praktis

Menjadi bahan masukan bagi dinas PURP kabupaten Indragiri hilir dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemeliharaan sarana prasarana jalan .

c. Kegunaan akademis

Penelitian ini dapat juga bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pertimbangan penelitian yang akan melakukan penelitian yang akan datang .



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Menurut Sondang P. Siagian (2007:5) Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaandari keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai target dan tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Menuru zulkili (2005:16) konsep administrasi diidentifikasi dengan berbagai bentuk keterangan tertulis. Dalam studi administrasi dikonsepskan menjadi 2 yaitu:

a. Administrasi dalam arti sempit

Administrasi diartikan sebagai rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya.

b. administrasi dalam arti luas

pada konteks ini mmencakup keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah anusia didalam organisasi untuk mencapai satu sejumlah yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut syafri (2012;11) adanya unsur-unsur administrasi adalah sebagai berikut:

1. organisasi
2. manajemen
3. komunikasi
4. kepegawaian
5. keuangan
6. tata usaha
7. perbekalan
8. hubungan masyarakat

administrasi adalah rangkaian pekerjaan ketatausahaan atau kesekretariatan yang terkait dengan surat-menyurat (korespondensi) dan pengelolaan keterangan tertulis lainnya. Jadi administrasi adalah serangkaian kegiatan ketatausahaan dan kesekretariatan berupa surat menyurat dan pengelolaan data atau keterangan tertulis lainnya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya (zulkifli, 2005:16).

Alternatif pendekatan yang harus diimplementasikan oleh seorang administrasi untuk mencapai tujuan tersebut, salah satunya pendekatan yang ditawarkan dalam konteks ini adalah dengan berpegangan pada prinsip yang diyakini benar. Sebagaimana dimaksudkan bahwa prinsip yang diyakini benar manakala dijadikan pegangan dan acuan sangat mendukung terhadap upaya pencapaian suatu hasil yang diharapkan. Alternative prinsip-prinsip umum administrasi yang dijumpai dalam referensi ilmu administrasi .

Menurut Henry fayol (dalam Syafri, 2012:156) mengemukakan terdapat 14 prinsip umum administrasi:

- a. Pembagian kerja (division of work), adalah upaya yang harus dipertimbangkan untuk mendapatkan efisiensi dalam menggunakan tenaga kerja.
- b. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab (authority and responsibility). Harus ada kaitan antara wewenang dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan akibat yang timbul sebagai akibat kedudukan resmi seorang manajer dan wewenang yang bersifat pribadi yang merupakan gabungan dari intelegensia, pengalaman, nilai-nilai moral, pekerjaan masa lampau.
- c. Disiplin (discipline), disiplin berarti sikap dan perilaku yang selalu sesuai dengan ketentuan, atau dengan kata lain, sikap dan perilaku yang konsekuen, tidak hanya pada norma-norma yang berlaku tapi juga dengan nilai-nilai tujuan yang ingin dicapai.
- d. Kesatuan perintah (unity of command), pekerja bawahan menerima hanya dari satu pemimpin atasan.
- e. Kesatuan arah atau tujuan (unity of direction). Bahwa kegiatan organisasi harus mempunyai tujuan yang sama dan langsung dari perencanaan yang dibuat oleh manajer.
- f. Mendahulukan atau mengutamakan atau menempatkan kepentingan umum (organisasi) di atas kepentingan pribadi (subordination of individual to general interest). Dalam hal ini kepentingan organisasi sebagai kepentingan bersama yang harus didahulukan bukan kepentingan pribadi.

- g. Pengumpamaan atau pengajian (remuneration). Pemberian ganjaran sebagai balas jasa, sebagai alat motivasi dan pendorong.
- h. Sentralisasi (centralization). Wewenang perlu didelegasi kepada bawahan, tetapi tanggung jawab akhir tetap dipegang oleh pimpinan puncak (top manager)
- i. Jenjang hierarki (scalar chain). Tingkat wewenang yang dimiliki.
- j. Ketertiban (order). Penempatan dan pendayagunaan sumber daya orang-orang dan barang-barang sesuai dengan tempatnya dalam organisasi.
- k. Keadilan (equity), pelaksanaan yang adil pada semua pihak.
- l. Stabilitas jabatan (stability of tenure), memberikan waktu yang cukup sangat diperlukan pekerjaan untuk menjalankan uangnya dengan sangat efektif, sehingga perlu mengurangi intensitas pergantian jabatan atau personal.
- m. Solidaritas kelompok kerja (esprits de corps) prinsip ini menitik beratkan semangat persatuan dan kesatuan, perlunya kerjasama dan memelihara hubungan antara pekerja untuk menumbuhkan dan meningkatkan motivasi kerja.
- n. Prakarsa atau inisiatif, dalam semua tingkat organisasi semangat kerja didukung oleh perkebangan prakarsa, dan karenanya kepada bawahan perlu diberikan kebebasan untuk memikirkan dan mengeluarkan pendapat semua tentang aktivitas, bahkan melihat dan menilai kesalahan-kesalahan yang terjadi.

Menurut (Yussa & Hendry Andry 2015:11) administrasi memiliki beberapa unsur yang karena adanya unsur ini menjadikan administrasi itu ada.

Adapun unsure-unsur administrasi yang dimaksud adalah:

1. Dua orang individu atau lebih
2. Target
3. Tanggung jawab yang akan dilaksanakan
4. Fasilitas dan perlengkapan.

Administrasi Menurut Dwight Aldo (2012:10) adalah tindakan yang diperhitungkan dengan cermat untuk merealisasikan tujuan tertentu yang dikehendaki dengan kerugian/pengorbanan yang minimal untuk mewujudkan tujuan lain yang dikehendaki. Dari pengertian ini ide pokok menurut waldo sebagai berikut:

1. Administrasi adalah kegiatan
2. Kegiatan dilaksanakan dengan bekerja sekelompok orang atau individu
3. Sebuah kegiatan dilaksanakandengan tepat.
4. Sebuah kegiatan kerja sama yang tepat dilaksanakan guna mencapai tujuan yang diinginkan.

Menurut The Liang Gie (dalam Pasolong 2013) mendefenisikan administrasi merupakanrangkaian kegiatan terhadap terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama mencapai tujuan tertentu dari batasan yang dikemukakan oleh the liang gie, dapat diinterpretasikan bahwa administrasi tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam pekerjaan oleh beberapa orang yang bekerjasama mencapai tujuan yang ingindi capai.

Jadi dapat disimpulkan bahwa administrasi merupakan rangkaian kegiatan atau proses usaha kerja sama kelompok orang dalam wadah organisasi untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien.

2. Konsep Organisasi

Administrasi dan organisasi saling berkaitan satu dengan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan yang ingin dicapai maka perlu adanya tempat (wadah) untuk bekerjasama dan tempat inilah yang dinamakan organisasi .

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seseorang atau sekelompok orang disebut bawahan siagian (1985:7). (dalam Tarmizi Yussa & Hendry Andry 2015;14).

Dari batasan makna organisasi ini dapat ditinjau dari dua aspek yaitu organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi dijalankan, organisasi sebagai rangkaian hierarki antara orang-orang dalam suatu ikatan formal. Sebagai wadah administrasi relative bersifat statis, sedangkan sebagai suatu rangkaian hierarki organisasi merupakan suatu proses, dengan demikian ia bersifat lebih dinamis.

Definisi H.B Siswanto (2013;73) organisasi adalah sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan bekerja sama untuk mewujudkan tujuan bersama dalam suatu organisasi mengandung 3 elemen, yaitu.

1. Sekelompok orang
2. Interaksi dan kerja sama, dan
3. Tujuan bersama.

Sebagai suatu proses, organisasi berarti serangkaian aktivitas kolektif sekelompok orang yang diawali dengan persekutuan tujuan, pembagian kerja dengan perincian tugas tertentu, pendelegasian wewenang, pengawasan, dan diakhiri denganpengevaluasian pelaksanaan tugas. Definisi organisasi menurut pendekatan proses pendapat massie (dalam Zulkifli dan Moris a. Yogia 2014:20) yaitu organisasi adalah suatu kerjasama kelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitas nya kearah pencapaian tujuan bersama.

Richard Scott (dalam Miftah Thoha 2011;35) organisasi merupakan sebagai kesatuan fikiran dalam usaha untuk mengejar tujuan, sebagai bentuk persatuan yang kuat dimana organisasi merupakan tempat untuk mengejar target masing-mmasing, sebagai suatu system transparat dimana kelangsungan organisasi sangat tergantung masukan dari sekeliling, sebagai aspek penduduk dan banyak lagi pedagang yang dapat dipakai untuk memaknai organisasi.

Jammes D. Mooney mengemukakan organisasi adalah bentuk setiap persekutuan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi Menurut Chaster I. Bernard adalah suatu system kegiatan yang diarahkan pada tujuan yang hendak dicapai. Fungsi utama manajemen yaitu perumusan tujuan dan pengadaan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan (dalam zulkili & Nurmasari 2015:41).

Menurut John D. Millet (inu Kencana 2003:113) organisasi adalah sebagai rangkaian dimana pekerjaan dari beberapa orang di laksanakan untuk mencapai tujuan bersama.

Dwight aldo (Inu Kenana, 2003:114) mendefenisikan organisasi adalah suatu struktur dari kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antar orang-orang pada suatu system administrasi.

Berdasarkan penentuan organisasi dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan tempat dimana orang-orang yang bekerjasama dengan pembagian tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam system koordinasi dan pengaturan guna memudahkan pencapaian beberapa tujuan yang telah ditetapkan.

3. Konsep Manajemen

Manajemen didefinisikan sebagai kemampuan atas keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan orang lain. Siagian (195;6) dapat dikatakan bahwa manajemen merupakan inti dari administrasi karena emang manajemen merupakan alat pelaksanaan utama dari administrasi dengan perkataan lain administrasi dan manajemen tidak dapat dipisah-pisahkan anya kegiatan-kegiatanannya yang dapat dilakukan (dalam Tarmizi Yussa & Hendry Andry 2015;12).

Manajemen pada hakikatnya berfungsi untuk melakukan semua kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijaksanaan umum yang telah ditentukan pada tingkat administrasi. Fakta

ini menunjukkan lebih jelas bahwa manajemen merupakan aspek dari administrasi dan oleh karena itu administrasi lebih luas dari pada manajemen.

George R Terry dan Leslie (dalam Karyoto, 2016:3) Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan terhadap suatu kelompok orang kearah tujuan yang ingin capai atau tujuan berhasil. Artinya bimbingan perlu diberikan karena tidak semua tindakan terampil dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Cara yang digunakan untuk membimbing tergantung pada kebijakan dan arahan pemimpin, misalnya kepala bawahan yang kurang terampil dapat diberikan pelatihan atau meningkatkan kemampuannya.

Definisi konsep manajemen yang menunjukkan secara eksplisit esensialnya penataan terhadap sumber daya organisasi, tergambar pada rumusan yang dikemukakan oleh The Liang Gie 1993:14). Menurutnya, manajemen suatu sub konsep tata kepemimpinan merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa pergerakan orang-orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai. Dia juga mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki enam fungsi utama yaitu: perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahan, pengordinasian, pengontrolan, dan penyempurnaan. Dari batasan manajemen tersebut diatas diiysaratkan bahwa manajemen terdiri dari berbagai rangkaian kegiatan yang terintegrasi sebagai kesatuan utuh.

Menurut Waldo (dalam Zulkifli 2005;31) manajemen adalah suatu tindakan dengan maksud untuk mencapai hubungan kerjasama yang rasional dalam suatu system administrasi.

Manajemen menurut Suwanto dan Doni (2014:16) manajemen merupakan ilmu dan seni memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara benar dan tepat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Menurut Malayu Hasibuan (2014:2) mengatakan manajemen adalah ilmu dan mengatur proses pengendalian sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara benar dan tepat untuk mencapai suatu keinginan tertentu.

Didalam pengertian bahwa manajemen memiliki fungsi. Adapun fungsi tersebut kita kenal dengan POAC (Planning, organizing, actuating, Controlling) dimana fungsi ini berkaitan dengan teori system yang meliputi input, proses dan output. Sehingga suatu organisasi akan melakukan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan, serta pembagian tugas, yang demikian akan menunjang dan pencapaian tujuan yang efektif dan efisien.

Menurut Donovan dan Jackson (dalam Pasalong, 2014:82) mendefenisikan manajemen sebagai proses yang dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu, sebagai rangkaian pengetahuan dan tugas. Dari batasan yang disebutkan oleh Donovan dan Jackson dapat di interpretasikan, bahwa manajemen dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu, dan merupakan serangkaian keterampilan dalam mengelola organisasi serta sebagai serangkaian tugas yang melekat pada diri manajer atau pemimpin itu sendiri.

Menurut A.F Stoner dan Charles Wankel (dalam Siswanto 2005:2) manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan mengontrol upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. Menurut stoner dan wankel (dalam Siswanto, 2005:2) bahwa proses ada;ah cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dalam batasan manajemen tersebut prosesnya meliputi:

1. Perencanaan, yaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan
2. Pengorganisasian yaitu mengordinasikan sumber daya manusia serta sumber daya manusia serta sumber daya lainnya yang dibutuhkan.
3. Kepemimpinan yaitu mengupayakan agar bawahan bekerja sebaik mungkin
4. Kontro, yaitu memastikan apakah tujuan tercapai atau tidak dan jika tidak tercapai dilakukan tindakan perbaikan.

Menurut Paul Horsey dan Kenneth H. Blachard manajemen sebagai suatu usaha yang dilakukan dengan dan bersama individu atau kelompok untuk mencapai target suatu organisasi (dalam siswanto, 2005:2).

Manajemen sebagai seni berungsi untuk mencapai tujuan yang berhasil menghasilkan produk atau manfaat. Sementara manajemen sebagai ilmu berguna menunjukan hal-hal yang ditemukan (gejala-gejala), kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan memberikan penjelasan-penjelasan.

Menurut Nawawi (2008:41) beliau memilah-milah pengertian manajemen menjadi beberapa unsure diantaranya yaitu:

1. Unsur tujuan organisasi, yang bila dikaitkan dengan pandangan baru adalah keberhasilan dan juga manfaat lainnya, melalui dihasilkannya produk dan pelayanan yang berkualitas.
2. Unsur bantuan, yang bila dihubungkan dengan pandangan baru berarti pengikut sertaan dalam melaksanakan pekerjaan sebagai eksistensi organisasi melalui kerja individual dan kerja didalam tim.
3. Unsur orang lain, yang jika dikaitkan dengan hasil temuan baru, dapat diartikan para pekerja dan para manajer dan top manajer, namum jika para manajer dan top manajer dipandang sebagai kesatuan dan disebut eksekutif, maka orang lain adalah para pekerja yang harus diperlakukan sebagai partner.

Menurut darwis dkk (2005:5) yang mengatakan bahwa manajemen lebih mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia lainnya, oleh karena itu manajemen sangat diperlukan dalam sebuah organisasi untuk mendayagunakan sumber daya yang ada, maka dengan deikian diperlukan suatu konsep manajemen sumber daya manusia.

Menurut Teri (dalam siswanto, 2005:10) mengatakan secara esensi seorang ilmuwan dan seniman, memerlukan suatu pengetahuan yang dapat disusun menurut system yang memberikan kebenaran-kebenaran pokok yang dapat digunakan dalam mengoperasikan pekerjaanya .

Menurut Stoner berpendapat bahwa manajemen merupakan langkah merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran yang sudah ditetapkan (dalam Zulkifli 2005:28).

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah usaha dan pengetahuan dalam proses yang dilewati, meliputi rencana, menentukan, arahan, mengendalikan terhadap orang dengan cara kerja yang diinginkan.

4. Konsep Pelaksanaan

Menurut Westra (2011:24) Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan kapan waktu dimulainya.

Indikator yang terdapat dalam pelaksanaan menurut Westra sebagai berikut:

1. Melaksanakan semua rencana
2. Kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan
3. Melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan
4. Siapa yang akan melaksanakannya.

Menurut Mazmanian dan Sebatier (2014:68) pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang namun dapat pula berbentuk perintah atau keputusan badan eksekutif yang penting ataupun keputusan peradilan.

Menurut Tjokroadudjoyo (2014;7) pelaksanaan adalah proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dan kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program dan proyek.

Pelaksanaan menurut Abdullah (2014:151) pelaksanaan adalah suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut sekolah program atau kebijakan ditetapkan yang terdiri atas pengabilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.

Dari pengertian kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupunoperasional atau kebijakan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan.

5.Konsep manajemen Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber salah satu sumber daya yang terdapat didalam oranisasi, meliputi semua orang yang melakukan aktitas. Pentingnya unsur manusia sebagai sumber daya yang cukup potensial, yang perlu dikembangkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi organisasi dan bagi pengembangan dirinya, karena itulah manusia juga perlu di manajemen.

Menurut Hasibuan (2012;10) manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Selanjutnya Hasibuan (2012;7) mengatakan bahwa dengan adanya manajemen daya guna unsur-unsur manajemen akan dapat ditingkatkan. Unsur-unsur manajemen itu antara lain adalah:

1. *Man*: Man dalam organisasi publik diartikan sebagai sesuatu yang sangat menentukan karena manusia yang membuat tujuan melakukan proses kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, tanpa manusia tidak akan ada proses kerja.
2. *Money*: uang penting sebagai alat ukur dan alat ukur mengenai suatu usaha (besar kecilnya perusahaan diukur dari jumlah perputaran uang).
3. *Material* (bahan-bahan atau perlengkapan): manajemen ada karena adanya kegiatan manusia secara bersama-sama untuk mengurus material.
4. *Machines* (alat-alat): mesin sebagai alat bantu kerja, memudahkan melaksanakan pekerjaan, memberikan keuntungan terhadap tenaga kerja, pengunanya sangat tergantung kepada manusia serta mempermudah tujuan hidup manusia.
5. *Market*: market dalam organisasi public diartikan sebagai masyarakat atau warga Negara anggota organisasi.

Dalam perkembangan unsure *man*(manusia) telah berkembang menjadi suatu bidang ilmu manajemen yang disebut juga sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari khusus pada unsure manajemen tersebut yaitu *man*(manusia). Tanpa sumber daya manusia, maka sumber daya lainnya kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi, maka untuk itu sangat diperlukan manajemen sumber daya manusia

sebagai pengantar bagaimana menjalankan sebuah organisasi yang dibentuk dengan memanfaatkan sumber daya organisasi yang ada.

Dengan adanya Manajemen sumber daya manusia, maka sumber daya manusia dapat lebih diarahkan kepada kegiatan-kegiatan pencapaian tujuan organisasi seperti dinas perhubungan kota tembilahan dengan mengerakkan atau memanfaatkan atau mendayagunakan sumber daya yang lainnya untuk dapat bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Konsep Jalan

Perkembangan teknologi jalan raya dimulai dari sejarah perkembangan manusia yang selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhannya hidup dan berkomunikasi. Setelah manusia menetapkan berkelompok disuatu tempat mereka mengenal arti jarak yang jauh ataupun dekat. Maka dalam pemuatan jalan mereka berusaha mencapai jarak yang paling dekat dengan mengatasi rintangan-rintangan yang masih dapat mereka atasi. Menurut undang-undang Jalan Raya No.13/1980: jalan adalah jalan sebagai salah satu prasarana perhubungan hakekatnya merupakan unsur penting dalam usaha pengembangan kehidupan bangsa dan pembinaan kesatuan dan persatuan bangsa untuk mencapai tujuan nasional, yang hendak diwujudkan melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh, terarah dan terpadu serta berlangsung secara terus menerus.

Dalam kerangka itu maka jalan mempunyai prasarana yang penting dalam mewujudkan sasaran pembangunan nasional, seperti pemerataan pembangunan

dan hasil-hasilnya yang menuju pada terciptanya keadilan social bagi seluruh rakyat, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis, serta dalam jangka panjang terciptanya landasan yang kuat untuk tubuh dan berkembang atas kekuatan sendiri, menuju suatu masyarakat Indonesia yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Jalan adalah sarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api dan jalan kabel (UU No. 38 tahun 2004 tentang jalan).

Jalan umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Menurut UU No 38 tahun 2004 tentang jalan, selanjutnya disebut UU no 38 tentang jalan. Bahwa penyelenggaraan di Indonesia harus berdasarkan pada asas kemanfaatan, keserasian, keselarasan dan keseimbangan, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas, keberdayaan dan kebersihan, serta mewujudkan perkembangan antar daerah yang seimbang dan penataan hasil pembangunan. Agar diperoleh suatu penanganan jalan yang memberikan pelayanan yang optimal, diperlukan penyelenggaraan jalan secara terpadu dan bersinergi antar sector, energy, dan juga antar pemerintah daerah serta peran serta masyarakat termasuk para pelaku usaha.

7. Konsep Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang telah ada. Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan berupa pengendalian, perbaikan dan perawatan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap mampu melayani lalu lintas sehingga umur rencana jalan yang ditetapkan dapat tercapai. Berdasarkan Permen PU No.13/PRT/M/2011.

Dalam melaksanakan kegiatan pemeliharaan jalan, terdapat dua bentuk pemeliharaan yaitu

1. Pemeliharaan Rutin

Pemeliharaan rutin mencakup pekerjaan-pekerjaan yaitu seperti perbaikan kecil dan pekerjaan rutin, yang umumnya dilaksanakan pada angka waktu tertentu dan sebagai mana dikehendaki .

2. Pemeliharaan berkala

Pemeliharaan yang mempunyai frekuensi yang terencana lebih dari satu tahun pada salah satu lokasi dan pemeliharaan yang lebih berat, beberapa jenis pemeliharaan yang termasuk pada pemeliharaan berkala yaitu :

a. Pembangunan baru

Pembangunan baru yaitu pekerjaan untuk meningkatkan jalan yang semula jalan tanah atau jalan setapak menjadi jalan aspal yang dapat dilalui kendaraan baik itu roda empat dan memerlukan biaya yang lebih besar.

b. Pekerjaan Rehabilitasi

Pekerjaan rehabilitasi yaitu pekerjaan yang dilakukan bila pekerjaan pemeliharaan yang seharusnya secara tetap dilaksanakan telah diabaikan dan juga terlalu lama ditunda, sehingga keadaan permukaan jalan memburuk . Pembangunan kembali secara keseluruhan biasanya diperlukan bila kerusakan structural suda tersebar luas sebagai akibat diabaikannya pemeliharaan, kekuatan desain yang tidak sesuai atau umur rencana jalan suda terlewati .

c. Pekerjaan peningkatan

Pekerjaan peningkatan yaitu standar pelayanan dari jalan yang sudah ada, baik dengan membuat lapisan menjadi lebih halus, maupun penambahan lapisan, ataupun pelebaran jalan yang bertujuan untuk mmeningkatkan kondisi jalan yang sebelumnya.

8. Konsep Pengawasan

Menurut Manullang (2004:13) pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut tery (dalam sala, 2007:23) merumuskan pengawasan sebagai proses penentuan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu

mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Pengawasan menurut Feriyanto(2015:63) erupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengaruh. Sebagai salah satu fungsi mmanajemen, mekanise pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperluka. Pelaksanaan suatu rencaana atau program tanpa diiringi dengan suatu system pengawasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mmengakibatkan lambat-lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Adapun tahap-tahap proses pengaasan, antara lain:

a. Tahap penetapan standar

Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.

b. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat.

c. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan

Beberapa proses yang berulang-ulangdan kontinu yang berupa pengamatan, laporan, metode, pengujian dan sampel.

d. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan.

Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan.

- e. Tahap pengambilan tindakan koreksi. Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

Menurut Manulang (2004;16). Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, mmenilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan semula.

Pengawan terhadap segala tindakan pemerintah daerah termasuk juga keputusan kepala daerah dan peraturan daerah memiliki sifat:

- a. Pengawasan prefentif yaitu pengawasan dilakukan sesudah keputusan daerah ditetapkan tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku.
- b. Pengawasan represif yaitu pengawasan dilakukan sebelumm keputusan-keputusan atau peratusan daerah tersebut dikeluarkan atau dibuat.
- c. Pengawasan umum yaitu pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang perintah daerah dan komponen-komponen dalam lingkungan departemen dalam negeri.

Menurut siagian (2008:115) agar pengawasan dapat berjalan efekti dan efesien, dapat digunakan beberapa teknik pengawasan yaitu:

- a. Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin organisasi atau pemerintah melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan sedang dijalankan dengan beberapa bentuk seperti inspeksi langsung.

- b. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahannya yang berbentuk laporan tulisan dan lisan.

Teknik pengawasan menurut Siagian (2008:115) untuk menjadi indikator pengukuran didalam pengawasan itu sendiri, yaitu:

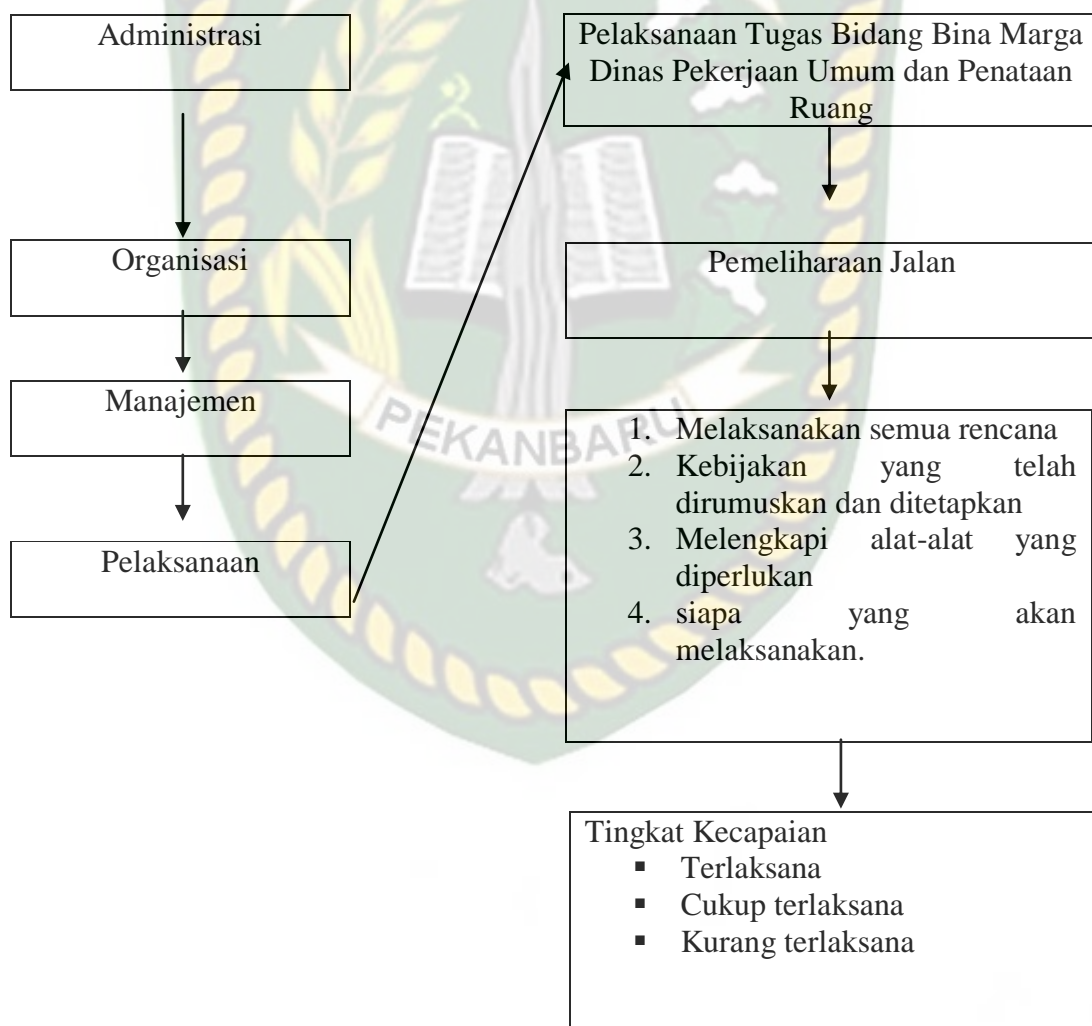
- a. Pengawasan langsung
 - 1. inspeksi langsung adalah pengawasan yang dilakukan secara langsung atau pemeriksaan mendadak oleh atasan terhadap bawahan pada saat kegiatan sedang dilakukan.
 - 2. Observasi ditempat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan terhadap bawahan sebelum kegiatan dilakukan
 - 3. Laporan ditempat adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan saat mengadakan inspeksi langsung pada saat kegiatan sedang dilaksanakan.
- b. Pengawasan tidak langsung
 - 1. Laporan tertulis adalah suatu pertanggungjawaban kepada atasan mengenai pekerjaan yang dilaksanakan, sesuai dengan instruksi dan tugas-tugas yang diberikan atasan.
 - 2. Laporan lisan adalah laporan yang disampaikan bawahan secara langsung kepada atasan mengenai kendala yang dihadapi saat melaksanakan kegiatan, baik berupa penyimpangan ataupun saran.

Prinsip pengawasan memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai rencana, sehingga harus ada perencanaan tertentu, instruksi dan wewenang kepada bawahan kita. Prinsip lainnya adalah harus merefleksikan sifat-sifat kebutuhan dari aktivitas yang harus dievaluasi, fleksibel dapat merefleksikan pada organisasi, ekonomis, dapat dimengerti dan dapat menjamin diadakannya tindakan koreksi.

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan maka penulis membuat suatu kerangka pikir dari penelitian ini yaitu:

Gambar II.1: Kerangka Pikiran Tentang Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Pemeliharaan Jalan Kota Tembilahan



C. Konsep Operasional

Untuk memudahkan memberikan pemahaman dalam menafsirkan istilah ataupun konsep terkait penelitian ini, maka peneliti memberikan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini .

1. Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaandari keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai target dan tujuan yang telah disepakati sebelumnya.
2. Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terkait dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dala ikatan mana terdapat seseorang atau sekelompok orang disebut bawahan.
3. secara esensi seorang ilmuwan dan seniman, memerlukan suatu pengetahuan yang dapat disusun menurut system yang memberikan kebenaran-kebenaran pokok yang dapat digunakan dalam mengoperasikan pekerjaanya.
4. Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanyadan kapan waktu dimulainya.

5. pengawasan sebagai proses penentuan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
6. Jalan merupakan prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap, dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
7. Pemeliharaan rutin merupakan mencakup pekerjaan-pekerjaan perbaikan kecil dan pekerjaan-pekerjaan rutin yang umum dilaksanakan pada jangka waktu yang teratur dalam tahun atas dasar sebagaimana yang dikehendaki.
8. Pemeliharaan berkala merupakan kegiatan berupa tindakan pencegahan terjadinya kerusakan yang lebih parah, dan mempunyai waktu dan jadwal terencana lebih dari satu tahun pada salah satu lokasi .
9. Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang adalah lembaga yang bertanggung jawab kepada daerah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pemeliharaan jalan.

D. Operasional Variabel

Operasional variabel penelitian ini yaitu tentang pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan dikabupaten Indragiri Hilir (studi pada bidang bina marga). Adapun penjabaran variable-variabel proses pemeliharaan jalan tersebut kedalam operasional variabel dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Gambar 11.1Operasionalisasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Tugas Dinas
Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan
jalan di Kota Tembilahan

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Pelaksanaan merupakan Menurut Westra (2011:24) Pelaksanaan adalah sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan dan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat pelaksanaanyadan kapan waktu dimulainya.	Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Dikabupaten Indragiri Hilir (Studi Pada Bidang Bina Marga)	1. melaksanakan semua rencana 2. kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan 3.melengkapi alat-alat yang diperlukan 3. Siapa yang akan melaksanakan	a. Menetapkan target b. Mengidentifikasi hambatan c. Menyusun strategi a. Melakukan kegiatan pemeliharaan b. Melakukan pemantuan c. Pembiayaan pemeliharaan a. Pengoperasian peralatan b. Alat manual c. Alat khusus a.Kelompok kerja b. Tugas dan tanggung jawab dalam pemeliharaan c.Personil kerja	terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana terlaksana Cukup terlaksana Kurang terlaksana

Sumber: modifikasi penulis, 2021

E. Teknik Pengukuran

Untuk mempermudah dan menganalisa data, maka penelitian terhadap pelaksanaan variabel atau indicator dibagi tiga kategori yaitu: terlaksana, cukup terlaksana, dan kurang terlaksana.

terlaksana : apabila rata-rata penelitian jawaban terhadap indicator dari pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan dikabupaten Indragiri hilir 67%-100%.

Cukup terlaksana : apabila rata-rata jawaban penelitian terhadap indicator dari pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan di inhil 34%-66%.

Kurang terlaksana : apabila rata-rata penelitian jawaban terhadap indicator dari pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan dikabupaten indragiri hilir 0%-33%.

Sedangkan untuk pengukuran variabel digunakan kategori sebagai berikut:

1. Melaksanakan semua rencana

terlaksana : apabila akumulasi persentase item penilaian pada indicator sumber daya dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada interval 67%-100%.

Cukup terlaksana : apabila akumulasi persentase item penilaian pada indikator sumber daya dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada interval 34%-66%.

Kurang terlaksana : apabila akumulasi persentase item penilaian pada indikator sumber daya dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada interval 0%-100%.

2. Kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan

terlaksana : Apabila akumulasi dan persentase item penilaian pada indikator sumber daya dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada interval 67-100%.

Cukup terlaksana : apabila akumulasi dari persentase item penilaian pada indikator sumber daya dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada interval 34-66%.

Kurang terlaksana : apabila akumulasi dari persentase item penilaian pada indikator sumber daya dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada interval 1-33%.

3. Melengkapi alat-alat yang diperlukan

Terlaksana : apabila akumulasi persentase item penilaian pada indicator sumber daya dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada interval 67%-100%.

Cukup terlaksana : apabila akumulasi persentase item penilaian pada indicator sumber daya dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada interval 34%-66%.

Kurang terlaksana : apabila akumulasi persentase item penilaian pada indicator sumber daya dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada interval 0-33%.

4. Siapa yang akan melaksanakan

Terlaksana : apabila akumulasi persentase item penilaian pada indicator sumber daya dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada interval 70%-100%.

Cukup terlaksana : apabila akumulasi persentase item penilaian pada indicator sumber daya dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada interval 33%-70%.

Kurang terlaksana : apabila akumulasi persentase item penilaian pada indicator sumber daya dapat dilaksanakan atau jawaban responden berada pada interval 0-20%.

BAB III

Metode Penelitian

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini digunakan yaitu tipe surveydeskriptif, yaitu menggambarkan keadaansesungguhnya atau keadaan yang sebenarnya terjadi. Penelitian menggunakan tipe survey deskriptif karena dalam penelitianini penulis secara langsung turun kelapangan guna untuk mencari data dataresponden. Data yang dimaksud adalah data mengenai Pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan dikota tembilahan (studi pada BidangBina Marga)

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif karena menurut Sugiyono (2012:8) dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandasan filsafat positivisme, dan digunakan untuk meneliti populasi dan sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistic dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dikantor dinas pekerjaan umum dikabupaten Indragiri hilir kota tembilahan. Penulis menangkap fenomena tentang pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan dikabupaten Indragiri hilir (studi pada bidang bina marga)

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dan sampel sangat diperlukan dalam sebuah penelitian untuk mengumpulkan data variabel yang diteliti. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai yang terdapat pada kantor dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Indragiri Hilir.

2. Sampel

Menurut Sugiyono (2018;131) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai dan staf-staf yang bekerja dan bertanggung jawab dalam pemeliharaan jalan dikabupaten Indragiri Hilir.

Tabel III. 1: Data populasi dan sampel di Dinas PURP Kota Tembilahan.

No	Unit Populasi	Populasi	Sampel
1	Kepala Dinas	1	1
2	Kepala bidang Bina Marga	1	1
3	Kepala seksi pemeliharaan jalan	1	1
4	Pegawai staf bidang bina marga	11	11
	Jumlah	14	14

Sumber data: Data olahan Penulis 2021

Tabel 111.2 Populasi dan Sampel Penelitian masyarakat dan pengguna jalan di Kota Kembilahan

No	Sub Populasi	populasi	Sampel
1	Masyarakat pengguna jalan	24,912	30
	Jumlah	24,912	30

Sumber : Data olahan penulis 2021

1). Jalan H.Sadri, saya berdiri selama satu jam, dihitung ada 150 orang yang lewat, sementara disini ada 34 rumah. 1 rumah ada 3 orang x 34 rumah= 102 orang. Jadi sisanya ada 48 orang yang lalu lalang.

Kenapa propositive yaitu karena justru orang yang tinggal dijalan H.Sadri. 102 istimasi dari 34 rumah. Jadi dalam sehari, 150 orang x 24 jam= 3.600 Pengguna jalan H.Sadri

2). Jalan Abdul Manap, berdiri selama satu jam, dihitung ada 98 orang yang lewat, sementara disini ada 25 rumah, dalam 1 rumah ada 3 orang x 25 rumah= 75. Jadi sisanya ada 23 orang yang lalu lalang.

Kenapa propositive yaitu karna justru orang yang tinggal dijalan Abdul Manap.75 istimasi dari 25 rumah. Jadi dalam sehari ada 98 orang x 24 jam= 2.352 Pengguna jalan Abdul Manap.

3). Jalan Batang Tuaka, berdiri selama satu jam, dihitung ada 230 orang yang lewat, sementara disini ada 45 rumah, 1 rumah ada 4 orang x 45 rumah= 180. Jadi sisanya ada 50 orang yang lalu lalang.

Kenapa Proposive yaitu karna justru orang yang tinggal Batang Tuaka. 180 istimasi dari 45 rumah. Jadi dalam sehari, $230 \text{ orang} \times 24 \text{ jam} = 5.520$ pengguna jalan Batang Tuaka.

4). Jalan Kartini, berdiri selama satu jam dihitung ada 100 orang yang lewat. Sementara disini ada 18 rumah, 1 rumah ada 3 orang $\times 18 \text{ rumah} = 54$. Jadi sisanya ada 46 orang yang lalu lalang.

54 orang adalah istimasi dari 18 rumah paling banyak 3 orang yang lewat. Jadi dalam sehari, $100 \text{ orang} \times 24 \text{ jam} = 2.400$ pengguna jalan kartini.

5). Jalan H.said, berdiri selama satu jam diitung ada 190 orang yang lewat, sementara disini ada 50 rumah, 1 rumah ada 3 orang $\times 50 \text{ rumah} = 150$ orang, jadi sisanya ada 40 orang yang lalu lalang.

150 orang istimasi dari 50 rumah, jadi dalam satu hari $190 \text{ orang} \times 24 \text{ jam} = 4.560$

6). Jalan Ipeda, berdiri selama satu jam dihitung ada 70 orang yang lewat. Sementara disini ada 15 rumah, 1 rumah ada 4 orang $\times 15 \text{ rumah} = 60$ orang. Jadi sisanya ada 10 orang yang lalu lalang.

60 orang istimasi dari 15 rumah, jadi dalam sehari $70 \text{ orang} \times 24 \text{ orang} = 1680$ pengguna jalan Ipeda.

7). Jalan Pelaja, berdiri selama satu jam, dihitung ada 200 orang yang lewat. Sementara disini ada 39 ruah, 1 rumah ada 3 orang $\times 39 \text{ rumah} = 117$, jadi sisana ada 83 yang lalu lalang.

117 istimasi dari 39 rumah, jadi dalam sehari, 200 orang x 24 jam= 4.800

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik dalam penarikan sampel dalam penelitian ini yaitu untuk, kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, kepala bidang bina marga, dan kepala seksi pemeliharaan jalan adalah teknik sensus. Menurut Sugiyono (2015:53) sensus adalah teknik penentuan sampel bila pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu.

Sementara pada masyarakat digunakan teknik proposive sampling. proposive sampling menurut Djaman Satori (2007:6) adalah teknik pengambilan sampling yang ditetapkan dengan menyesuaikan pada tujuan penelitian atau pertimbangan tertentu. Penelitian ini mengambil siapa saja yang menurut pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer

Menurut Iskandar (2008:253) adalah data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada responden. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dan kusioner dengan responden tentang pendapatnya yang berkaitan seputar Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang dalam Pemeliharaan Jalan Kota Tembilahan.

2. Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008:253) adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahannya terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan (tulisan dan lainnya yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian). Data sekunder berfungsi sebagai pelengkap atas data primer, seperti peraturan pemerintah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara-cara sebagai berikut:

1. Wawancara

yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung sumbernya. Menurut Ridwan (2009:29) wawancara ini merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian dengan cara berdialog melalui tanggung jawab langsung dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti dengan mengajukan beberapa pertanyaan.

2. Kuesioner

adalah suatu daftar angket yang berisikan rangkaian pertanyaan mengenai sesuatu masalah atau bidang yang akan diteliti (dalam Narbuko dan Abu Achmad (2008:76). Responden disini yaitu pegawai dinas pekerjaan umum khususnya bidang bina Marga dan masyarakat kota tembilahan.

3. Observasi

adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Pada observasi penulis melakukan pengamatan langsung dalam bentuk pra survey di dinas pekerjaan umum serta pengamatan langsung pada beberapa jalan yang mengalami kerusakan dikota Tembilahan.

4. Dokumen,

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yaitu dengan cara mengumpulkan data dan penghimpun dan menganalisa dokumen-dokumen. Baik dengan dokumen tertulis dokumen elektronik.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis statistic deskriptif dan setelah semua data yang dipergunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya data dikelompokkan dan diolah menurut janisnya yang hasilnya disajikan dalam bentuk tabel, angka, persentase, dan dilengkapi dengan uraian serta keterangan yang mendukung, kemudian dianalisis dengan metode deskripti, yaitu suatu cara yang dilakukan untuk menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data yang terkumpul secara menyeluruh tentang suatu keadaan atau permasalahan yang terjadi pada objek penelitian sebagaimana adanya suatu analisa yang berusaha memmberikan gambaran terperinci berdasarkan kenyataan atau fakta-fakta dilapangan untuk kemudian mengambil kesimpulan serta disajikan dalam bentuk penelitian didasarkan tata cara ilmiah.

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III.3 : jadwal waktu kegiatan penelitian Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam pemeliharaan jalan Kota Tembilahan Tahun 2020-2021.

Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu Ke															
	Oktober				November				Desember				Januari			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan UP	■	■	■	■												
Seminar UP					■											
Revisi UP						■	■	■								
Revisi Kuisisioner										■	■	■				
Rekomendasi survey											■	■				
Survey lapangan												■	■			
Analisis data													■	■	■	■
Penyusunan laporan hasil (skripsi)														■	■	■
Konsultasi revisi skripsi															■	■
Ujian konferensi skripsi																■
Revisi skripsi																■
Pengadaan skripsi																■

Modifikasi penulis 2020

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran lokasi penelitian

1. Geografis Kabupaten Indragiri Hilir

Kabupaten Indragiri Hilir resmi menjadi daerah tingkat II berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1965 tanggal 14 juni 1965 (LN RI. No.49). Daerah ini terletak di bagian selatan provinsi Riau dengan luas wilayah 11.605.97 km². Dalam posisi 0^o36'LU, 1^o07'LS, 104^o10'BT dan 102^o32'BT.

Sedangkan batas wilayah kabupaten Indragiri hilir yaitu:

- Sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Tanjung Jabung barat (provinsi Jambi)
- Sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Pelalawan
- Sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Indragiri hulu
- Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Tanjung balai Karimun (provinsi kepulauan Riau).

Sebagian besar luas wilayah 93,31 daerah kabupaten indragiri hilir merupakan daerah dataran rendah, yaitu daerah endapan sungai, daerah rawa dengan tanah gambut, daerah hutan mangrovedan terdiri dari atas pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang 1.082.953.07 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 dari permukaan laut. Kabupaten Indragiri hilir terletak dilantai timur pulau Sumatra, merupakan gerbang selatan provinsi Riau 11.605.98 km² dan perairan 7.207 km².

Indragiri hilir yang dulunya mempunyai julukan negeri seribu parit dan yang sekarang dengan julukan negeri seribu jembatan dikelilingi perairan berupa sungai besar,kecil, rawa-rawa, laut dan parit.

Secara fisiografiskabupaten Indragiri hilir beriklim tropis merupakan sebuah daerah dataran rendah yang terletak diketinggian 0-4 meter diatas permukaan laut dan dipengaruhi oleh pasang surut.Kabupaten Indragiri hilir berpenduduk pada tahun 2015 berjumlah 703.734 jiwa dari berbagai etnis.

2. Iklim

Kabupaten Indragiri hilir sangat dipengaruhi oleh pasang surutnya air sungai/parit, dimana sarana perhubungan yang dominan untuk menjangkau daerah satu dengan lainnya adalah melalui sungai atau parit dengan menggunakan kendaraan speed bot, perahu, pompong,diantara sungai-sungai yang utama didaerah ini adalah sungai Indragiri hilir yang berasal dari danau singkarak (propinsi Sumatra barat) yang bermuala diselat berhala.

Kabupaten Indragiri hilir ini terletak pada dataran rendah atau daerah pesisir timur dengan ketinggian <500 Meter dari permukaan laut. Hal ini mengakibatkan daerah kabupaten Indragiri hilir ini menjadi daerah rawa-rawa yang beriklim tropis basah. Akan tetapi, Ada beberapa desa yang merupakan dataran tinggi desa-desa tersebut terdapat di kecamatan keritang dan kecamatan kemuning. Hal ini membuat lahan pertanian didaerah tersebut tidak terpengaruhi oleh air laut.

Curah hujan tertinggi terjadi pada November tahun 2017 yaitu sebesar 274,4 mm dan terendah pada Februari tahun 2017 yaitu 13,3 mm. Sedangkan rata-rata hari hujan tertinggi terjadi pada bulan november 2017 sebanyak 15 hari dan terendah terjadi pada bulan Februari 2017 sebanyak 2 hari.

Sebagian besar luas wilayah atau 93,31 Daerah kabupaten Indragiri hilir merupakan daerah dataran rendah, daerah endapan sungai. Daerah rawa dengan tanah gambut (peat), daerah hutan payau (mangrove) dan terdiri dari atas beberapa pulau-pulau besar dan kecil dengan luas lebih kurang dari 1.082.953.06 hektar dengan rata-rata ketinggian lebih kurang 0-3 meter dari permukaan laut.

3. Geografis

Di kabupaten Indragiri hilir dengan jumlah penduduk meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data badan pusat statistik tahun 2015 dapat dilihat jumlah penduduk kabupaten Indragiri hilir berjumlah 703.734 jiwa. Penduduk laki-laki tahun 2014 berjumlah 361.315 jiwa sedangkan penduduk perempuan 342.419 jiwa.

Penduduk laki-laki lebih banyak dari pada perempuan. Hal ini ditunjukkan oleh sex ratio sebesar 106. Berarti setiap 100 penduduk perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki.

Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah kecamatan tembilahan yaitu 74.087 jiwa, dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah sungai Batang yaitu 12.490 jiwa. Berikut ini adalah jumlah penduduk kabupaten Indragiri hilir dilihat pada tabel IV.1 :

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Kecamatan Tahun 2015.

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)
1	Pulau burung	22.642
2	Teluk belengkong	17.235
3	Pelangiran	45.205
4	Kateman	46.734
5	Mandah	40.284
6	Gaung	40.893
7	Gaung anak serka	22.465
8	Batang tuakan	28.068
9	Kempas	34.781
10	Tempuling	31.403
11	Tembilahan hulu	45.604
12	Tembilahan	74.087
13	Concong	13.644
14	Kuala Indragiri	19.785
15	Tanah merah	31.462
16	Enok	34.870
17	Sungai batang	12.490
18	Reteh	44.598
19	Kemuning	32.290
20	Keritang	65.194
Jumlah		7.033.734 jiwa

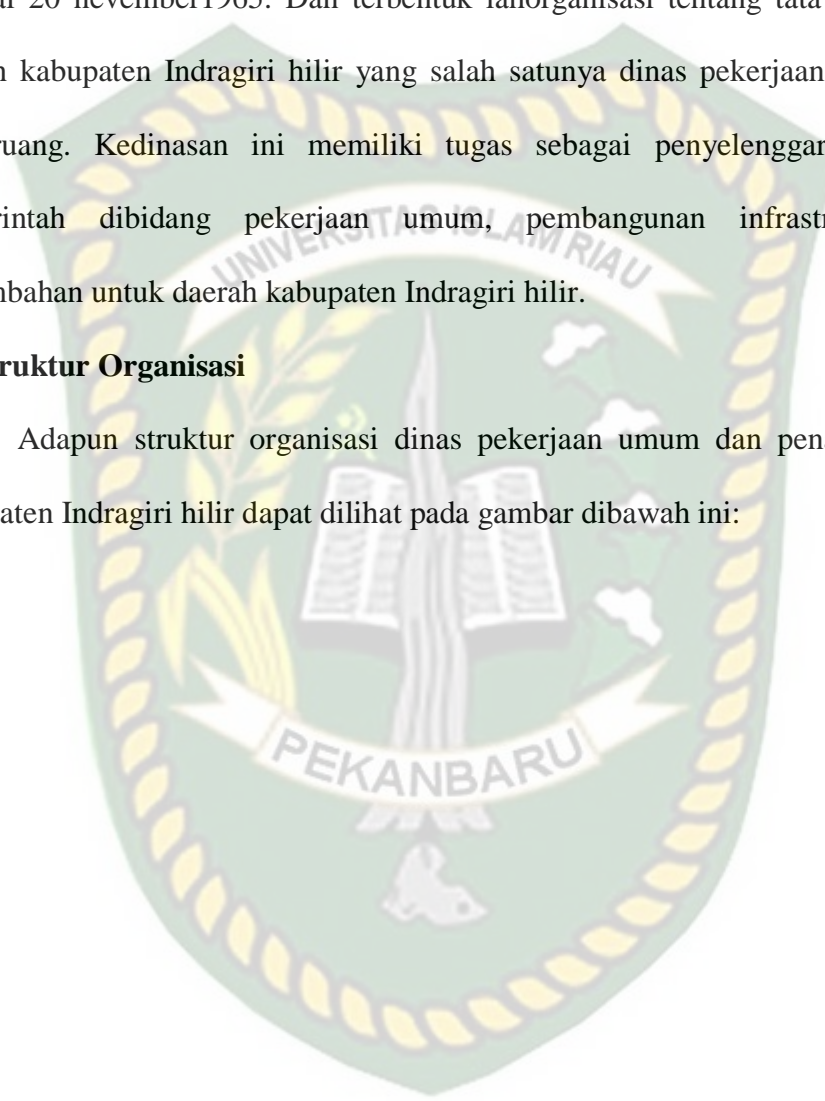
B. Gambaran Singkat Tentang Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir

Pada tanggal 14 Juni 1965 dikeluarkan undang-undang nomor 6 tahun 1965 lembaran negara republik Indonesia no.49 maka daerah persiapan kabupaten

Indragiri hilir resmi dimekarkan menjadi kabupaten daerah tingkat 2 Indragiri hilir (kabupaten Indragiri hilir) yang berdiri sendiri, yang pelaksanaannya terhitung tanggal 20 November 1965. Dan terbentuklah organisasi tentang tata kerja dinas daerah kabupaten Indragiri hilir yang salah satunya dinas pekerjaan umum dan tata ruang. Kedinasan ini memiliki tugas sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah dibidang pekerjaan umum, pembangunan infrastruktur dan penambahan untuk daerah kabupaten Indragiri hilir.

C. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Indragiri hilir dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar IV.11 struktur dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Indragiri hilir tahun 2020



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

D. Tugas Pokok Dan Fungsi

Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Indragiri hilir berdasarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2014 tentang organisasi tata kerja dinas pekerjaan umum dan tata ruang bidang bina marga kabupaten Indragiri hilir. Adapun tugas pokok dan fungsinya yaitu:

1. Kepala Dinas

Kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati. Kepada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang adapun fungsinya:

- a. Perencanaan dan perumus kebijakan teknis pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang dan petunjuk atasan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas.
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dan penataan ruang.
- c. Pembinaan dan pelaksanaan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang
- e. Penyelenggaraan urusan penataan usaha dinas sesuai dengan kewenangannya.
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun merumuskan dan melaksanakan program kerja sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan undang-undang. Adapun fungsi sekretariat adalah :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Indragiri hilir.
- b. Perencanaan, penyusunan, perumusan, dan pelaksanaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. Penyelenggaraan kegiatan administrative umum, kepegawaian, pengelolaan keuangan, penataan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. Pengordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. Pengordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban.
- f. Pengordinasian pembinaan pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan kantor
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala bidang bina marga

Kepala bidang bina marga melaksanakan tugas menyelenggarakan penanganan prasarana jalan dan jembatan beserta utilitasnya yang berkedudukan dan bertanggungjawab kepada kepala dinas.

Bina Marga telah memberikan petunjuk teknis tentang perencanaan dan penyusunan program jalan kabupaten (SK.77/KPTS/Db/1990). Buku tersebut mencakup prosedur perencanaan umum dan penyusunan program untuk pekerjaan berat (rehabilitas, peningkatan) dan pekerjaan ringan terutama pemeliharaan) pada jalan dan jembatan kabupaten, pada umumnya diklasifikasikan fungsinya sebagai jalan 'lokal', prosedur perencanaan ini dimaksudkan untuk dilaksanakan setiap tahun. Buku tersebut dibagi atas 2 bagian:

- Bagian A, berisi garis besar dan tujuan dari prosedur disertai dengan informasi mengenai pembagian waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaannya.
- Bagian B, berisi rincian prosedur survey yang terdiri dari 32 komponen tugas, dibagi dalam 5 kelompok tugas, yaitu:
 1. Kaji ulang dan pemutahiran database
 2. Survey
 3. Analisis biaya
 4. Penarikan biaya persiapan
 5. Program tahunan

Adapun tugas dari bidang bina marga yaitu

- a. Penyusunan program kerja
- b. Mengkoordinasikan perencanaan, pemeliharaan, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan
- c. Pembinaan dan perumusan pengembangan industri jalan dan jembatan.

- d. Melakukan pengawasan, peningkatan rehabilitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan
- e. Pemberian bimbingan terhadap pemakaian jasa konsultan dan jasa kontruksi, dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya.
- f. Pemberian saran, pertimbangan dan rekomendasi pengaturan dan pemberian perizinan.

Bidang bina marga terdiri dari:

1. Seksi perencanaan teknis
2. Seksi jalan, dan
3. Seksi jembatan.

Masing-masing seksi dipimpin oleh kepala seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang.

b. Seksi perencanaan teknis mempunyai tugas:

- a. Merumuskan kebijakan dibidang perencanaan jalan dan jembatan.
- b. Merencanakan sistem manajemen jalan serta pengelolaan informasi leger jalan dan jembatan
- c. Melaksanakan kegiatan survey dan perencanaan teknik
- d. Melaksanakan bimbingan teknis dibidang perencanaan jalan dan jembatan
- e. Melaksanaakan pembinaan pengelolaan dan analisa lingkungan bidang jalan dan jembatan.
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan kepala bidang.

c. Kepala seksi pemeliharaan jalan dan jembatan mempunyai tugas:

- a. Melaksanakan pembangunan jalan dan jembatan
- b. Melaksanakan pemeliharaan Jalan dan jembatan
- c. Melakukan evaluasi pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan
- d. Melaksanakan penanganan keadaan darurat jalan dan jembatan
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan keterangan yang diperoleh dari responden berupa data keusioner yang disebarkan oleh penulis yang berisikan mengenai nama, umur, jenis kelamin dan tingkat pendidikan responden dari pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir. Untuk lebih jelaskan mengenai hal ini maka dapat dilihat pada keterangan dibawah ini sebagai berikut:

1. Tingkat Pendidikan Responden

Semakin tinggi pendidikan seseorang matang pula pikirannya dalam berbuat dan bertingkah laku dalam mengambil keputusan dalam rangka melaksanakan suatu pekerjaan. Pendidikan adalah suatu usaha seseorang dalam rangka memberikan pengembangan terhadap pola pikir orang lain dalam memahami dan menilai sesuatu dimana dari tingkat pendidikan kita akan mengetahui kemampuan seseorang yang cenderung akan mempengaruhi pola pikir serta tingkah laku setiap orang. Pendidikan tidak bisa didapatkan begitu saja melainkan melalui beberapa tahapan-tahapan baik dari sekolah, lingkungan maupun itu keluarga.

Berdasarkan hasil dari penelitian penulis pada staff pegawai Bidang Bina Marga mengenai tingkat pendidikan, maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V.1: Identitas Responden Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	SD	-	-
2	SMP	-	-
3	SMA	5	45%
4	Diploma	-	-
5	S1/S2	6	55%
Jumlah		11	100%

Sumber: Data olahan Kuesioner dan wawanara 2021

Dari tabel tersebut dapat diketahui untuk responden pegawai dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Indragiri hilir yaitu untuk pendidikan SMA sebanyak 5 orang dengan persentase 45%, dan untuk pendidikan S1/S2 yaitu sebanyak 6 orang dengan persentase 55%. Maka dari gambaran tersebut bahwa responden paling banyak dalam penelitian ini adalah S1/S2 yaitu sebanyak 6 orang dengan persentase 55%.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa untuk identitas responden dari tingkat pendidikannya beragam. Tapi jika dilihat, tingkat pendidikan pegawai terbanyak memadai untuk kategori pelajar dan terdidik. Sehingga diharapkan dapat memberikan jawaban yang benar untuk penelitian ini.

Tabel V.2: Identitas Responden Masyarakat Kabupaten Indragiri hilir berdasarkan tingkat pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase
1	SD	-	-
2	SMP	3	10%
3	SMA	14	47%
4	Diploma	2	6%
5	S1	11	37%
Jumlah		30	

Sumber: Hasil Olahan Penulis 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa sebanyak 30 orang responden masyarakat dalam penelitian ini, untuk responden ang memiliki jenjang pendidikan SMP sebanak 3 orang atau sebesar 10%, sementara responden yang memiliki jenjang pendidikan SMA sebanyak 14 orang atau sebesar 47%, sementara responden diploma 2 orang atau sebesar 6%, dan responden ang memiliki jenjang pendidikan S1 sebanyak 14 orang atau sebesar 37%.

2. jenis Kelamin

Jenis kelamin pada masing-masing identitas responden terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Adapun jenis kelamin responden dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.3: Identitas Responden Pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah	Persentase%
1	Laki-laki	6	55%
2	Perempuan	5	45%
Jumlah		11	100%

Sumber: data olahan kuesioner dan wawancara 2021

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah responden pegawai dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Indragiri hilir jika dilihat dari jenis kelaminnya yaitu untuk jenis kelamin laki-laki lebih mendominasi dibandingkan dengan perempuan. Untuk jenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 6 orang dengan persentase 55%, sedangkan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 5 orang dengan persentase 45%. Dari keseluruhan jumlah responden 11 orang dengan persentase 100%.

Tabel V.4: Identitas Responden Masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	jumlah	Persentase(%)
1	Laki-laki	25	83%
2	Perempuan	5	17%
Jumlah		30	100%

Sumber: data olahan kuesioner dan wawancara 2021

Berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa dari 30 orang responden masyarakat. Terdapat sebanak 25 orang atau sebesar 83% adalah berjenis kelamin laki-laki dan responden jenis kelamin perempuan berjumlah 5 orang atau sebesar 17%.

3. Tingkat Umur

Tingkat umur sangat menentukan kemampuan seseorang dalam berfikir dan bertindak karena tingkat umur sangat erat hubungannya dengan pengalaman. Maka semakin tinggi atau umur tua seseorang maka akan semakin baik pengalamannya dan menentukan keputusan untuk bertindak atau bertingkah laku dibandingkan dengan yang berumur lebih muda. Maka itu untuk lebih jelasnya tentang tingkat umur responden pada penelitian ini dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel V.5: Identitas Responden Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Tingkat Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase(%)
1	20-30	7	64%
2	31-40	3	27%
3	41-50	1	9%
Jumlah		11	100%

Sumber: Data Olahan Kuesioner dan wawancara 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa responden yang berumur 20-30 tahun yaitu sebanyak 7 orang atau 64%, yang berumur 31-40 tahun sebanyak 3 orang atau 27%, sedangkan yang berumur 41-50 sebanyak 1 orang atau 9%. Jadi berdasarkan gambaran tersebut dapat diketahui bahwa responden pegawai pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dapat disimpulkan yang paling banyak responden yang memiliki umur 20-30 tahun yaitu dengan jumlah 7 orang atau 64%

dan yang paling sedikit yaitu responden yang memiliki umur 41-50 tahun dengan sebanyak 1 orang atau 9%.

Tabel V.6: Identitas Responden Masyarakat Kabupaten Idragiri Hilir Berdasarkan Umur

No	Umur	Jumlah	Persentase(%)
1	20-30	10	33%
2	31-40	12	40%
3	41-50	7	24%
4	50>	1	3%
Jumlah		30	100%

Sumber: Data Olahan Kuesioner dan wawancara 2021

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa dari 30 orang responden masyarakat yang berumur 20-30 sebanyak 10 orang atau 33% yang berumur 31-40 sebanyak 12 orang atau 40%, umur 41-50 sebanyak 7 orang atau 24%, sedangkan yang berumur 50> sebanyak 1 orang atau 3%. Jadi gambaran diatas dapat disimpulkan responden yang paling banyak yaitu yang memiliki umur 31-40 tahun dengan jumlah 12 orang atau 40%. Dan yang paling sedikit yaitu responden yang memiliki umur 50> dengan jumlah 1 orang atau persentase 3%.

B. Hasil Dan Pembahasan Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umur Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Kota Tembilahan

Untuk melihat pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan dikabupaten Indragiri hilir (studi pada bidang bina marga), maka penulis uraikan indikator yang digunakan sebagai berikut:

1. Melaksanakan Semua Rencana

Melaksanakan semua rencana maksudnya yaitu menetapkan tujuan yang akan dilakukan seperti perbaikan dan perawatan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap mampu melayani lalu lintas sehingga rencana yang ditetapkan dapat tercapai. Sehubungan dengan indikator melaksanakan semua rencana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.7: Distribusi frekuensi tanggapan responden pegawai terhadap Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umur Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Kota Tembilahan dari indikator melaksanakan semua rencana

No	Sub Indikator	Kategori Terlaksana			Keterangan
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
I	II	III	IV	V	VI
1	Menetapkan target	9 (82%)	2 (18%)	0	11 (100%)
2	Mengidentifikasi hambatan	9 (82%)	2 (18%)	0	11 (100%)

I	II	III	IV	V	VI
3	Menyusun strategi	7 (64%)	4 (36%)	0	11 (100%)
	Jumlah	25	8	0	33
	Rata-rata	9	2	0	11
	Persentase	82%	18%	0	100%

Sumber: Hasil olahan penelitian 2021

Dari tabel tersebut dapat dilihat jawaban responden pegawai untuk indikator pertama yaitu melaksanakan semua rencana, dapat dilihat mengenai menetapkan target dapat diketahui bahwa responden pegawai menjawab terlaksana sebanyak 9 orang dengan persentase 82%, kemudian yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 2 orang dengan persentase 18% dan yang menjawab kurang terlaksana tidak ada. Jadi rata-rata responden pegawai menjawab terlaksana untuk indikator menetapkan target oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan begitu jawaban responden pegawai sudah terlaksana.

Kemudian jawaban responden tentang mengidentifikasi hambatan jawaban terlaksana sebanyak 9 orang dengan persentase 82%, sedangkan responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 2 orang dengan persentase 18% sedangkan yang menjawab kurang terlaksana tidak ada. Jadi rata-rata responden menjawab terlaksana.

Dan jawaban responden tentang menyusun strategi, jawaban terlaksana mendapat 7 orang dengan persentase 64%, sedangkan yang menjawab cukup

terlaksana sebanyak 4 orang dengan 36%, dan yang menjawab kurang terlaksana tidak ada. Jadi rata-rata responden menjawab terlaksana.

Dengan demikian melalui sub indikator yang dinilai bahwasanya tanggapan responden yang menyatakan terlaksana 82%, kemudian yang menjawab cukup terlaksana dengan persentase 18%, sedangkan yang menjawab kurang terlaksana tidak ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap indikator melaksanakan semua rencana dikatakan terlaksana pada rentang persentase 67% - 100% dengan jumlah persentase 82%.

Kemudian tanggapan responden masyarakat mengenai melaksanakan semua rencana oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.8: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Kota Tembilihan Dari Indikator Melaksanakan Semua Rencana

No	Sub Indikator	Kategori Terlaksana			Keterangan
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
I	II	III	IV	V	VI
1	Menetapkan target	23 (76%)	5 (17%)	2 (7%)	(30%)
2	Mengidentifikasi hambatan	21 (70%)	7 (23%)	2 (7%)	30 (100%)
3	Menyusun strategi	15 (50%)	9 (30%)	6 (20%)	30 (100%)

I	II	III	IV	V	VI
	Jumlah	59	21	10	90
	Rata-rata	20	7	3	30
	Persentase	67%	23%	10%	100%

Sumber: Hasil Olahan penelitian 2021

Berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh responden masyarakat yang berasal dari kota tembilahan kabupaten Indragiri hilir yang berjumlah 30 orang yang penulis temui berada disekitar lokasi, dapat dilihat jawaban responden masyarakat dari indikator melaksanakan semua rencana. Untuk sub indikator identifikasi menetapkan target, baha responden masyarakat menjawab terlaksana sebanyak 23 orang dengan persentase 76%. Kemudian jawaban cukup terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase 17% dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 2 orang dengan persentase 7%. Jadi rata-rata respoden masyarakat menyatakan terlaksana, dengan alasan melihat adanya melaksanakan rencanayaitu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan seperti perbaikan dan peraatan ang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap mampu melayani lalu lintas.

Selanjutnya jawaban responden tentang mengidentifikasi hambatan, baha responden yang menjawab terlaksana sebanyak 21 orang dengan persentase 70%.Sedangkan yang mejawab cukup terlaksana sebanyak 7 orang dengan persentase 23%, dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 2 orang dengan persentase 7%.Jadi rata-rata responden masyarakat menyatakan terlaksana untuk mengidentifikasi hambatan.

Kemudian jawaban responden tentang menyusun strategi, adapun yang menjawab terlaksana sebanyak 15 orang dengan persentase 50%. Sedangkan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 9 orang dengan persentase 30%, dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 3 orang dengan persentase 9%.

Dengan demikian melalui sub indikator yang dinilai bahwasanya tanggapan-tanggapan responden yang menyatakan terlaksana dengan persentase 67%, sedangkan yang menyatakan cukup terlaksana dengan persentase 23%, dan yang menyatakan kurang terlaksana dengan persentase 10%, sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap indikator melaksanakan semua rencana dapat dikatakan terlaksana pada rentang persentase 67%-100% dengan jumlah persentase 67%. Jadi masyarakat menyatakan melaksanakan semua rencana oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam kegiatan pemeliharaan jalan sudah terlaksana.

Berdasarkan wawancara penulis pada tanggal 15 oktober 2021 kepada kepaladinas pekerjaan umum dan penataan ruang bapak umar ST:

“pastinya kita dinas pekerjaan umum sudah menetapkan target untuk kegiatan perbaikan jalan, mengenai tindakan yang diambil dalam penanganan jalan, selalu kami lakukan dengan baik, terlebih dahulu dilakukan seperti survey kondisi jalan, dengan mendata jenis kerusakannya, kemudian pengukuran kerusakan jalan terus kondisi jalannya sehingga nantinya dapat diambil tindakan yang tepat untuk penanganan yang akan dilakukan”.

2. Kebijakan Yang Telah Dirumuskan Dan Ditetapkan

Kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan maksudnya yaitu suatu pelaksanaan berdampak nyata terhadap pemeliharaan jalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Sehubungan dengan indikator menetapkan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel V.9: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Kota Tembilahan Dari Indikator Kebijakan Yang Telah Dirumuskan Dan Ditetapkan

No	Sub Indikator	Kategori Terlaksana			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
I	II	III	IV	V	VI
1	Melakukan kegiatan pemeliharaan	9 (82%)	2 (18%)	-	11 (100%)
2	Melakukan pemantauan	10 (91%)	1 (9%)	-	11 (100%)
3	Pembiayaan pemeliharaan	5 (45%)	6 (55%)	-	11 (100%)
	Jumlah	24	9	-	33
	Rata-Rata	8	3	-	11
	Persentase	73%	27%	-	100%

Sumber: data olahan hasil penelitian dilapangan 2021

Dari hasil tanggapan responden diatas dapat diketahui untuk indikator kedua yang membahas kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Dapat diketahui mengenai melakukan kegiatan pemeliharaan jala, bahwa responden

pegawai menjawab terlaksana sebanyak 9 orang dengan persentase 82%, sedangkan responden yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 2 orang dengan persentase 18%. Dan yang menjawab kurang terlaksana tidak ada. Jadi rata-rata responden pegawai menyatakan sudah terlaksana atas melakukan kegiatan pemeliharaan jalan, dengan begitu jawaban responden sudah berperan.

Selanjutnya jawaban responden tentang melakukan pemantauan, yang menjawab terlaksana sebanyak 10 orang dengan persentase 91% dan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 1 orang dengan persentase 9%, sedangkan yang menjawab kurang terlaksana tidak ada. Jadi, rata-rata responden menjawab terlaksana,

Jawaban responden mengenai pembiayaan pemeliharaan yang menjawab terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase 45% dan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 6 orang dengan persentase 55%, dan yang menjawab kurang terlaksana tidak ada. Jadi rata-rata responden menjawab terlaksana.

Dengan demikian melalui sub indikator yang dinilai bahwasanya tanggapan responden pegawai yang menyatakan terlaksana dengan persentase 73%, kemudian yang menyatakan cukup terlaksana dengan persentase 27%, sedangkan yang menjawab kurang terlaksana tidak ada. Sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap indikator kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dikatakan terlaksana pada rentang persentase 67%-100% dengan jumlah persentase 82%.

Kemudian tanggapan responden masyarakat mengenai kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam pemeliharaan jalan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.10: Distribusi Rekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Kota Tembilahan Dari Indikator Kebijakan Yang Telah Dirumuskan Dan Ditetapkan

No	Sub Indikator	Kategori Terlaksana			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
I	II	III	IV	V	VI
1	Melakukan kegiatan pemeliharaan	21 (70%)	8 (27%)	1 (3%)	30
2	Melakukan pemantauan	21 (70%)	6 (20%)	3 (10%)	30
3	Pembiayaan pemeliharaan	22 (73%)	8 (27%)	-	30
	Jumlah	64	22	4	90
	Rata-Rata	21	7	2	30
	Persentase	70%	23%	7%	100%

Sumber: data olahan hasil penelitian dilapangan 2021

Berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh responden masyarakat dikota tembilahan yang berjumlah 30 orang yang penulis temui disekitar lokasi, untuk indikator kedua kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Mengenai melakukan kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan ole dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, mendapat jawaban terlaksana sebanyak 21 orang dengan

persentase 70%, kemudian yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 8 orang dengan persentase 27%, dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 1 orang dengan persentase 3%. Jadi rata-rata responden masyarakat menyatakan terlaksana.

Jawaban responden mengenai melakukan pemantauan dalam pemeliharaan jalan, mendapatkan jawaban terlaksana sebanyak 21 orang dengan persentase 70%. Dan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 6 orang dengan persentase 20%, sedangkan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 3 orang dengan persentase 10%. Jadi rata-rata responden masyarakat menyatakan terlaksana.

Selanjutnya jawaban responden mengenai pemeliharaan, mendapatkan jawaban terlaksana sebanyak 22 orang dengan persentase 73%, kemudian yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 8 orang dengan persentase 23%, sedangkan yang menjawab kurang terlaksana tidak ada. Jadi, rata-rata responden menjawab terlaksana.

Dengan demikian, melalui sub indikator yang dinilai bahwasanya tanggapan responden masyarakat yang menyatakan terlaksana dengan persentase 70%, kemudian yang menyatakan cukup terlaksana dengan persentase 23%, dan yang menjawab kurang terlaksana dengan persentase 7%. Sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap indikator kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dapat dikatakan sudah terlaksana pada rentang persentase 67%-100%, dengan jumlah persentase 70%.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten Indragiri hilir, Pak Umar ST yaitu:

“untuk melakukan kegiatan pemeliharaan tidak semua terakomodir, mungkin ada beberapa jalan, seperti contohnya pemeliharaan tahun lalu banyyak kegiatan pemeliharaan yang tidak bisa dilaksanakan karena kita kena rasionalisasi karena dananya tidak ada.karena tergantung ketersediaan sumber dana kabupaten Indragiri hilir, sementara dalam pelaksanaan pembangunan keadaan geograis kita,daa dukung tanahnya sangat rendah, kemudian factor alam seperti banjir, arus lalu lintas padat, dan kurangnya kesadaran masyarakat seperti contohnya rambunya hilang”

Sementara itu, adapun kutipan wawancara terhadap kepala bidang bina marga, bapak Ali Murtono pada tanggal 15 oktober 2021 yaitu:

“untuk pelaksanaan pemeliharaan jalan disemua jalan kabupaten dilakukan pemeliharaan, namun semua kembali lagi, tergantung dengan ketersediaan dana, misalnya sada jalan rusak mungkindijalan lain ada yang lebih membutuhkan keterbatasan dana itulah kita yang memprioritaskan. Ada proses, kebutuhan hari ini tidak bisa langsung dikerjakan kalau teknisnya suting dulu, hitung dulu, ajukan dulu, disetujui dewan dulu. Kemudian tergantung anggaranna ada atau tidak. Proses inilah yang kadang-kadang kesanya tidak diperhatikan, tidak dikerjakan. Tapi sudah mendekati sudah diaktualkan tahun ini.Pemeliharaan jalan ini mestinya diukung oleh perannya masyarakat yang ikut memanfaatkan jalan dengan sebaik-baiknya.”.

Dari wawancara dengan kepala dinas pekerjaan umum dan penatan ruang, kepala bidang bina marga yang tertera diatas. Berdasarkan observasi dan analisis data penulis menyimpulkan bahwa melakukan kegiatan pemeliharaan jalan sering terkendala oleh factor alam seperti hujan, banjir yang mempengaruhi proses pengerjaan jalan atau kualitas dari pengerjaan jalan itu sendiri, kemudian kepadatan lalu lintas dan kurangnya kesadaran pengguna jalan, dan pelaksanaan jalan tidak bisa dilaksanakan merata dijalan-jalan rusak kabupaten Indragiri hilir. Sementara pembiayaan dalam pemeliharaan jalan, anggaran APBD kabupaten Indragiri hilir terbatas sehingga pemeliharaan tidak merata dan tidak bisa dilakukan terlihat masih adanya jalan rusak dikota tembilahan.

3. Melengkapi Alat-Alat Yang Diperlukan

Maksudnya yaitu alat-alat yang diperlukan dalam kegiatan pemeliharaan jalan dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama. Indikator pelaksanaan pemeliharaan jalan ang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.11: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Kota Tembilahan Dari Indikator Melengkapi Alat-Alat Yang Diperlukan

No	Sub Indikator	Kategori Terlaksana			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
I	II	III	IV	V	VI
1	Pengoperasionalan peralatan	3 (27%)	7 (64%)	1 (9%)	11 (100%)
2	Alat manual	2 (18%)	7 (64%)	2 (18%)	11 (100%)
3	Alat khusus	2 (18%)	9 (82%)	-	11 (100%)
	Jumlah	7	23	3	33
	Rata-Rata	3	7	1	11
	Persentase	27%	64%	9%	100%

Sumber: data olahan hasil penelitian dilapangan 2021

Dari hasil tanggapan responden diatas dapat diketahui untuk indikator melengkapi alat-alat yang diperlukan, mengenai pengoperasionalan peralatan adapun responden yang menjawab terlaksana sebanyak 3 orang dengan persentase 27% dan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 7 orang dengan persentase 64%, sedangkan yang menjawab kurang berperan sebanyak 1 orang dengan persentase 9%. Jadi rata-rata responden menyatakan cukup terlaksana.

Selanjutnya jawaban responden mengenai alat manual, adapun yang menjawab terlaksana sebanak 2 orang dengan persentase 18%, dan yang

menjawab cukup terlaksana sebanyak 7 orang dengan persentase 64%, sedangkan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 2 orang dengan persentase 18%. Jadi rata-rata responden menyatakan cukup terlaksana.

Jawaban responden mengenai alat khusus terhadap pemeliharaan jalan adapun yang menjawab terlaksana sebanyak 2 orang dengan persentase 18%, dan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 9 orang dengan persentase 82%, sedangkan yang menjawab kurang terlaksana tidak ada. Jadi rata-rata responden menjawab cukup terlaksana.

Dengan demikian, dari sub indikator yang dinilai bahwasanya tanggapan responden menyatakan terlaksana dengan persentase 27%, kemudian yang menyatakan cukup terlaksana dengan persentase 64%, serta yang menyatakan kurang terlaksana dengan persentase 9%, sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap indikator pelaksanaan pemeliharaan jalan dapat dikatakan cukup terlaksana pada rentang persentase 34%-67%, dengan jumlah 64%.

Kemudian tanggapan responden masyarakat mengenai perlengkapan alat-alat yang diperlukan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel.12: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Kota Tembilahan Dari Indikator Melengkapi Alat-Alat Yang Diperlukan

No	Sub Indikator	Kategori Terlaksana			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
I	II	III	IV	V	VI
1	Pengoperasionalan peralatan	7 (23%)	20 (67%)	3 (10%)	30 (100%)
2	Alat manual	3 (10%)	19 (63%)	8 (27%)	30 (100%)
3	Alat khusus	4 (13%)	16 (54%)	10 (33%)	30 (100%)
	Jumlah	14	55	21	90
	Rata-Rata	5	18	7	30
	Persentase	17%	60%	23%	100%

Sumber: data olahan hasil penelitian dilapangan 2021.

Berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh responden masyarakat dikota tembilahan berjumlah 30 orang yang penulis temui disekitar lokasi, untuk indikator ketiga melengkapi alat-alat yang diperlukan, mengenai pengoperasionalan peralatan, adapun yang menjawab terlaksana sebanyak 7 orang dengan persentase 23%, dan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 orang dengan persentase 67%, sedangkan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak

3 orang dengan persentase 10%. Jadi rata-rata responden masyarakat menjawab cukup terlaksana terlaksana.

Selanjutnya jawaban responden mengenai alat manual, adapun yang menjawab terlaksana sebanyak 3 orang dengan persentase 10%, dan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 19 orang dengan persentase 63%, sedangkan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 8 orang dengan persentase 27%. Jadi rata-rata responden menjawab cukup terlaksana terlaksana.

Kemudian masyarakat menjawab mengenai alat khusus yang dinilai bahwasanya tanggapan responden yang menyatakan terlaksana 4 orang dengan persentase 13% dan yang menyatakan cukup terlaksana 16 orang dengan persentase 54 %, sedangkan yang menjawab kurang terlaksana 10 orang dengan persentase 33%. Maka untuk indikator melengkapi alat-alat yang diperlukan berada pada kategori cukup terlaksana.

Dengan demikian melalui sub indikator yang dinilai bahwasanya tanggapan responden yang menyataka terlaksana dengan persentase 17%, dan yang menyatakan cukup terlaksana 60%, sedangkan yang menyatakan kurang terlaksana dengan persentase 23%, maka untuk indikator melengkapi alat-alat yang diperlukan berada pada kategori cukup terlaksana.

Berdasarkan wawancara terhadap kepala bidang bina marga, bapak Ali Murtono pada tanggal 15 oktober 2021 yaitu:

“untuk alat-alat manual pastinya ada dalam pengerjaan kegiatan pemeliharaan jalan”

4. Siapa Yang Melaksanakan

Maksudnya yaitu siapa saja yang ikut dalam kegiatan pemeliharaan jalan. Sehubungan dengan indikator siapa yang akan melaksanakan yang dilakukan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.13: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Terhadap Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Kota Tembilahan Dari Indikator Siapa Yang Akan Melaksanakan

No	Sub Indikator	Kategori Terlaksana			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
I	II	III	IV	V	VI
1	Kelompok kerja	10 (91%)	1 (9%)	-	11 (100%)
2	Tugas dan tanggung jawab dalam pemeliharaan	8 (73%)	3 (27%)	-	11 (100%)
3	Personil kerja	9 (82%)	2 (18%)	-	11 (100%)
	Jumlah	27	6	-	33
	Rata-Rata	9	2	-	11
	Persentase	82%	18%	-	100%

sumber: dataolahan hasil penelitian dilapangan 2021

Dari hasil tanggapan responden diatas dapat diketahui untuk indikator yang keempat siapa yang akan melaksanakan, mengenai kelompok kerja adapun yang menjawab terlaksana sebanyak 10 orang dengan persentase 91%, dan yang menjawab cukup terlaksana 1 orang dengan persentase 9%, sedangkan yang menjawab kurang terlaksana tidak ada. Jadi rata-rata responden menyatakan terlaksana. Mereka mengatakan ada kelompok kerja yang dibuat oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam kegiatan pemeliharaan jalan.

Selanjutnya jawaban responden mengenai tugas dan tanggung jawab, adapun yang menjawab terlaksana sebanyak 8 orang dengan persentase 73%, dan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 3 orang dengan persentase 27%, sedangkan yang menjawab kurang terlaksana tidak ada. Jadi rata-rata responden masyarakat menyatakan sudah terlaksana.

Jawaban responden mengenai personil kerja, adapun yang menjawab terlaksana sebanyak 9 orang dengan persentase 82%, dan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 2 orang dengan persentase 18%, dan yang menjawab kurang terlaksana tidak ada. Jadi rata-rata responden menjawab terlaksana. Hal ini mereka mengatakan ada personil kerja yan dibuat oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

Dengan demikian dari sub indikator yang dinilai, bahwasanya tanggapan responden pegawai yang menyatakan terlaksana dengan persentase 82%,kemudianyang menjawab cukup terlaksana dengan persentase 18%,

sedangkan yang menjawab kurang terlaksana tidak ada. Jadi rata-rata responden menyatakan sudah terlaksana.

Kemudian tanggapan responden masyarakat mengenai siapa yang akan melaksanakan pemeliharaan jalan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel V.14: Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Kota Tembilahan Dari Indikator Siapa Yang Akan Melaksanakan

No	Sub Indikator	Kategori Terlaksana			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	
I	II	III	IV	V	VI
1	Kelompok keja	9 (30%)	20 (67%)	1 (3%)	30 (100%)
2	Tugas dan tanggung jawab dalam pemeliharaan	9 (30%)	19 (64%)	2 (6%)	30 (100%)
3	Personil kerja	4 (13%)	21 (70%)	5 (17%)	30 (100%)
	Jumlah	22	60	8	90
	Rata-Rata	7	20	3	30
	Persentase	23%	67%	10%	100%

Sumber: data olahan hasil penelitian dilapangan 2021

Berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh responden masyarakat dikota tembilahan yang berjumlah 30 orang yang penulis temui disekitar lokasi, untuk indikator keempat siapa yang akan melaksanakan, mengenai kelompok kerja

adapun yang menjawab terlaksana sebanyak 9 orang dengan persentase 30%, dan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 20 orang dengan persentase 67%, sedangkan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 1 orang dengan persentase 3%. Jadi rata-rata responden masyarakat menjawab cukup terlaksana.

Kemudian tanggapan responden mengenai tugas dan tanggung jawab, adapun yang menjawab terlaksana sebanyak 9 orang dengan persentase 30%. Dan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 19 orang dengan persentase 64%, dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 2 orang dengan persentase 6%. Jadi rata-rata responden menjawab cukup terlaksana.

Selanjutnya tanggapan responden mengenai personil kerja, adapun yang menjawab terlaksana sebanyak 4 orang dengan persentase 13% dan yang menjawab cukup terlaksana sebanyak 21 orang dengan persentase 70%, dan yang menjawab kurang terlaksana sebanyak 5 orang dengan persentase 17%. Jadi rata-rata responden menyatakan cukup berperan. Hal ini mereka menyatakan karena adanya personil kerja yang dibuat oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dengan demikian sub indikator yang dinilai bahwasanya tanggapan responden yang menyatakan terlaksana dengan persentase 23%, yang menjawab cukup terlaksana dengan persentase 67%, sedangkan yang menjawab kurang terlaksana dengan persentase 10%. Sehingga dapat disimpulkan terhadap indikator siapa yang akan melaksanakan dapat dikatakan cukup terlaksana dengan rentang persentase 34%-67%.

Sedangkan berdasarkan wawancara dengan kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang pada tanggal 15 oktober 2021 yaitu:

“untuk kelompok kerja tergantung model kerjanya, jika swa kelola dilaksanakan sendiri ada tim swa kelola kita, siapa yang penanggung jawab keseluruhan, siapa yang penanggung jawab tenaga kerja, penanggung jawab peralatan/material. tapi, jika dikontrakan dengan pihak ketiga, jasa kontruksi atau rekaan, tentunya tim mereka sendiri yang mengatur, kita tidak perlu mengatur mereka, kita membayar pekerjaan yang artinya sudah jadi”.

Dan kutipan wawancara terhadap kepada bidang bina marga 15 oktober 2021:

“untuk personil kerja tergantung besar/kecilnya dan atau rumit tidaknya suatu pekerjaan pemeliharaan”.

Berdasarkan wawancara kepala dinas pekerjaan umum dan kepala bidang bina marga diatas menurut observasi dan analisis penulis menyimpulkan bahwa kelompok kerja maupun pihak yang ikut berkoordinasi dalam pemeliharaan jalan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan tugasnya masing-masing dalam pemeliharaan jalan. Penanggung jawab tenaga kerja dan lainnya sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya dengan baik.

Berdasarkan jawaban responden terhadap pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan dikabupaten Indragiri hilir dari keseluruhan indikator mengenai melaksanakan semua rencana, kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, melengkapi alat-alat yang

diperlukan, dan siapa yang akan melaksanakan. Dapat dirangkumkan jawaban responden dalam sebuah tabel rekapitulasi dibawah ini:

Tabel V.15: Rekapitulasi Jawaban Responden Pegawai Tentang Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Kota Tembilahan

No	Indikator	Pengukuran Variabel			Keterangan
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
I	II	III	IV	V	VI
1	Melaksanakan semua rencana	9	2	0	11
		82%	18%	0	100%
2	Kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan	8	3	0	11
		73%	27%	0	100%
3	Melengkapi alat-alat yang diperlukan	3	7	1	11
		27%	64%	9%	100%
4	Siapa yang akan melaksanakan	9	2	0	11
		82%	18%	0	100%
Jumlah		29	14	1	44
Rata-rata		8	2	1	11
persentase		73%	18%	9%	100%

Sumber: olahan data hasil penelitian dilapangan 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat dari hasil rekapitulasi responden pegawai staf dinas pekerjaan umum dan penataan ruang khususnya bidang bina marga dari

seluruh indikator bahwa pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dapat dilihat dilihat perincian tabel diatas dari setiap indikator yaitu:

1. Melaksanakan Semua Rencana

Pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan dikabupaten Indragiri hilir (studi pada bidang bina marga) dari indikator melaksanakan semua rencana sudah terlaksana, dengan persentase 82%. Artinya melaksanakan semua rencana sudah dilaksanakan dengan baik oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang.

2. Kebijakan Yang Telah Dirumuskan Dan Ditetapkan

Pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan dikabupaten Indragiri hilir (studi pada bidang bina marga) dari indikator kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan sudah terlaksana, dengan persentase 73% , pihak pihak yang ikut serta dalam pemeliharaan jalan, maupun yang ikut terkait dalam pemeliharaan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing.

3. Melengkapi Alat-Alat Yang Diperlukan

Pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan dikabupaten Indragiri hilir (studi pada bidang bina marga) dari indikator melengkapi alat-alat yang diperlukan, cukup terlaksana dengan persentase 64%. Artinya cukup dilaksanakan dengan baik meskipun masih belum optimal.

4. Siapa Yang Akan Melaksanakan

Pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan dikabupaten Indragiri hilir (studi pada bidang bina marga) dari indikator siapa yang akan melaksanakan, sudah terlaksana, artinya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sudah melaksanakan dengan baik, namun perlu ditingkatkan lagi agar arahan dan evaluasi dimasa mendatang dalam pemeliharaan jalan semakin baik.

Maka dapat disimpulkan bahwasanya hasil rekapitulasi dari jawaban responden pegawai pada seluruh indikator dikatakan terlaksana pada rentang 67%-100% dengan persentase 73%, artinya pelaksanaan sudah dilaksanakan dengan baik namun belum sepenuhnya pemeliharaan jalan dilaksanakan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil observasi dari empat indikator tersebut, masih terdapat keterangan dan belum terlaksana dengan sepenuhnya pemeliharaan jalan, terlihat masih banyaknya jalan yang butuh penanganan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, meskipun begitu dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sudah berusaha semaksimal mungkin dalam memperhatikan infrastruktur jalan di kabupaten Indragiri hilir dan kota tembilahan.

Pada indikator pertama, melaksanakan semua rencana sudah terlaksana, dimana dinas pekerjaan umum dan penataan ruang menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan seperti perbaikan dan perawatan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap mampu melayani lalu lintas sehingga rencana yang ditetapkan dapat tercapai.

Pada indikator kedua, kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan sudah terlaksana, dimana suatu pelaksanaan yang berdampak nyata terhadap pemeliharaan jalan sesuai dengan peraturan yang ada.

Pada indikator ketiga, melengkapi alat-alat yang diperlukan cukup terlaksana, dimana alat-alat yang diperlukan dalam pemeliharaan jalan dan dapat juga digunakan dalam jangka waktu yang cukup lama.

Pada indikator keempat, siapa yang akan melaksanakan dikatakan sudah terlaksana, dimana pihak-pihak maupun dinas lain ikut berperan dalam pemeliharaan jalan, seperti halnya kelompok kerja yang mempunyai tim penanggung jawab.

Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana jawaban responden mengenai keseluruhan indikator pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan yang terdiri dari empat indikator sebagai penilaian.

Tabel V.16: Rekapitulasi Jawaban Responden Masyarakat Tentang Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Kota Tembilahan

No	Indikator	Pengukuran Variabel			Keterangan
		Terlaksana	Cukup terlaksana	Kurang terlaksana	
I	II	III	IV	V	VI
1	Melaksanakan semua rencana	20	7	3	30
2	Kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan	21	7	2	30
3	Melengkapi alat-alat yang diperlukan	5	7	18	30
4	Siapa yang akan melaksanakan	7	20	3	30
Jumlah		53	41	26	120
Rata-rata		13	11	6	30
persentase		43%	37%	20%	100%

Sumber: olahan data hasil penelitian dilapangan 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat dari hasil rekapitulasi responden masyarakat dari keseluruhan indikator bahwa pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan dikabupaten Indragiri hilir (studi pada bidang bina marga) dapat dilihat perincian diatas dari setiap indikator yaitu:

1. Melaksanakan Semua Rencana

Pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan dikabupaten indragiri hilir (studi pada bidang bina marga) dari indikator survey kondisi jalan, sudah terlaksana dengan persentase 67%, artinya sudah dilaksanakan dengan baik.

2. Kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan

Pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan dikabupaten indragiri hilir (studi pada bidang bina marga) dari indikator kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, dengan persentase 70%, yang mana pihak-pihak yang ikut serta dalam pemeliharaan jalan, maupun yang ikut terkait dalam pemeliharaan jalan sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan tugas dan kewajibannya masing-masing.

3. Melengkapi alat-alat yang diperlukan

Pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan dikabupaten indragiri hilir (studi pada bidang bina marga) dari indikator melengkapi alat-alat yang diperlukan kurang terlaksana, dengan persentase 60%.

4. Siapa Yang Akan Melaksanakan

Pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan dikabupaten indragiri hilir (studi pada bidang bina marga) dari indikator siapa yang akan melaksanakan cukup terlaksana dengan persentase 67%.

Maka dapat disimpulkan bahwasanya hasil rekapitulasi dari jawaban responden masyarakat pada seluruh indikator dikatakan cukup terlaksana pada

rentang 34%-67%.dengan persentase 43%, artinya pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik walaupun masih belum optimal.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, obserasi, wawancara dan kuesioner dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dan masyarakat mengenai pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan runag dalam pemeliharaan jalan dikabupaten Indragiri hilir (studi pada bidang bina marga), dapat dikatakan sudah cukup terlaksana. Namun dari empat indikator tersebut, masih terdapat al yang belum maksimal, dalam pemeliharaan jalan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang. Dimana pada indikator kedua kebijakan yyang telah dirumuskan dan ditetapkan, masih banyak jalan yang membutuhkan penanganan jalan, tetapi belum juga menjadi prioritas pemeliharaan jalan.Dan pada indikator keempat yang mana masih dibutuhkan tenaga ahli geodesi (jalan) dan team leader yang mana mempunyai keahlian dalam bidang jalan.

Berdasarkan observasi, analisis dan pengumpulan data, penulis menyimpulkan masih kurang tanggapnya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan yang semestinya pada kerusakan ringan bisa segera melakukan perbaikan dengan berkesinambungan melalui swa kelola yang dilakukan setiap tahunnya, sehingga jalan rusak tidak meluas seperti pada saat ini setidaknya terdapat 7 titik jalan rusak sedang dan berat dikota tembilahan.

Dari hasil rekapitulasi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hasil penarikan sampel melalui kuesioner dan responden masyarakat dan pegawai untuk indikator pelaksanaa tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang

dalam pemeliharaan jalan mengenai melaksanakan semua rencana, kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan, melengkapi alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan dinilai berada pada 'cukup terlaksana'.

C. Faktor-faktor penghambat Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Kota Tembilahan

Adapun faktor-faktor penghambat eksternal maupun internal yang penulis temukan setelah melakukan penelitian di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang berdasarkan dari hasil pengamatan penulis baik itu dilapangan maupun melalui proses wawancara yaitu sebagai berikut:

1. Masih kurangnya tenaga ahli jalan oleh pihak ketiga yang bekerja sama oleh dinas pekerjaan umum, seperti tenaga ahli geodesi mengenai jalan, dan tenaga ahli team leader yang berfungsi dan bertugas mengawasi, mengarahkan, mengatur jalan nya pekerjaan jalan, sesuai dengan keahliannya, sehingga suatu pekerjaan tersebut dapat menghasilkan kualitas jalan baik.
2. Struktur dan daya dukung tanah kabupaten Indragiri hilir yang rendah dan gambut, menyebabkan seringnya terjadi banjir sehingga menjadi salah satu faktor kurang mendukung ketahanan jalan sesuai rencana umur yang telah ditargetkan.
3. Kurangnya kesadaran pengguna jalan untuk ikut menjaga pemanfaatan jalan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kondisi jalan yang disediakan, seperti pihak pengusaha maupun pihak yang mempunyai kepentingan

pribadi yang menggunakan kendaraan melebihi berat beban jalan, dan juga dari pengguna jalan itu sendiri yang menggunakan jalan dengan semena-mena.

4. Kondisi cuaca yang buruk pada saat proses pengerjaan, sehingga menghambat proses pengerjaan jalan yang sedang dikerjakan, sehingga mempengaruhi proses dan kualitas pengerjaan itu sendiri. Serta padatnya lalu lintas pengguna kendaraan yang kadang menghambat proses pengerjaan.
5. Kurangnya fasilitas sarana prasarana dalam pengawasan pemeliharaan jalan, fasilitas sarana prasarana sangatlah penting bagi pengawasan jalan hal ini dikarenakan kecamatan tembilahan bertepatan dilokasi yang dapat dikatakan topografinya kurang mendukung dan cuacanya tidak menentu, dengan adanya fasilitas sarana prasarana yang memadai pastinya akan memberikan dampak yang lebih efisien dalam pengawasan.
6. Kurangnya sosialisasi dari bina marga dan kurangnya inisiatif masyarakat untuk melaporkan jika ada jalanan rusak. Pihak bina marga mengatakan bahwa strategi yang digunakan adalah bersinergi dengan masyarakat, tapi dari pihak masyarakat kurang mengetahui tentang cara untuk melaporkan jalanan yang rusak sehingga strategi tersebut belum maksimal dilaksanakan, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari bina marga dan kurangnya inisiatif masyarakat untuk mencari tahu informasi tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian dilapangan yang telah dilakukan dan dianalisis serta dilengkapi dengan pembahasan hasil penelitian ini. Maka penulis memberikan kesimpulan secara umum dapat dikatakan bahwa penelitian membahas Pelaksanaan Tugas Bidang Bina Marga Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Kota Tembilahan dapat dikategorikan 'cukup terlaksana' pada rentang 34%-67% dengan persentase 43%, artinya pelaksanaan tugas pekerjaan umum dan penataan ruang sudah melaksanakan tugasnya dengan baik walaupun masih belum optimal.

1. Melaksanakan semua rencana berada pada ketegori terlaksana, dengan persentase 67%. dilihat dari item penilaian dinas pekerjaan umum dan penataan ruang selalu menetapkan tujuan dan tindakan yang akan dilakukan seperti perbaikan dan perawatan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agat tetap mampu melayani lalu lintas sehingga rencana yang ditetapkan dapat tercapai.
2. Indikator kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan berada pada kategori terlaksana, dengan persentase 70%. dimana suatu pelaksanaan berdampak nyata terhadap pemeliharaan jalan sesuai dengan peraturan yang ada. yang mana pihak-pihak yang ikut serta dalam pemeliharaan jalan, maupun yang ikut terkait dalam pemeliharaan jalan sudah

terlaksanan dengan baik sesuai dengan tugas dan keajibanya masing-masing

3. Indikator melengkapi alat-alat yang diperlukan berada pada kategori cukup terlaksana, dengan persentase 60%. yang mana masih kurangnya alat-alat dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan.
4. Indikator siapa yang akan melaksanakan berada pada kategori cukup terlaksana, dengan persentase 67% dimana masih kurangnya tenaga ahli jalan yaitu ahli geodesi, dan team leader yang melakukan pemeliharaan jalan dan arahan terhadap personil kerja.
5. Sehingga dapat disimpulkan dari tanggapan kedua responden yaitu pegawai dinas pekerjaan umum dan penataan ruang bidang bina marga, dan masyarakat pengguna jalan mengenai pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan di kabupaten Indragiri hilir dalam kategori cukup terlaksana.

B. Saran-Saran

Berdasarkan dari hasil kesimpulan diatas, peneliti mencoba merekomendasikan beberapa saran terkait dari hasil penelitian mengenai pelaksanaan tugas dinas pekerjaan umum dan penataan ruang dalam pemeliharaan jalan di kabupaten Indragiri hilir (studi pada bidang bina marga) yaitu sebagai berikut:

1. Hendaknya dinas pekerjaan umum dan penataan ruang bisa segera melakukan pemeliharaan rutin dan berkesinambungan terhadap jalan

yang mengalami rusak ringan, sehingga jalan rusak ringan tidak bertambah parah dan meluas sehingga perbaikannya akan lebih mudah dan biaya pengerjaannya pun lebih kecil, sehingga jalan rusak dikota tembilahan dapat diminimalkan.

2. Diharapkan dinas perhubungan maupun pemerintah daerah kabupaten Indragiri hilir lebih meningkatkan lagi pengawasan terhadap kendaraan yang akan melintasi kawasan kota, dengan memblokir pengguna kendaraan mobil berat melalui terminal menggunakan kendaraan yang sesuai, atau dengan memasang portal, agar mobil tersebut tidak dapat melewati kawasan jalan kota bahkan disaat malam hari.
3. Diharapkan pemerintah daerah kabupaten Indragiri hilir bisa mengalokasikan dana untuk pemeliharaan jalan oleh dinas pekerjaan umum dan penataan ruang sehingga jalan rusak kawasan kota dapat diminimalkan.
4. Agar terwujudnya sarana dan prasarana jalan yang baik untuk kebutuhan bersama, hendaknya kesadaran para pengguna jalan, pihak pengusaha dan masyarakat yang mempunyai kepentingan pribadi, agar bisa memanfaatkan jalan sebaik baiknya sesuai dengan kondisi jalan yang telah disediakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Edisi Revisi VI). Jakarta: Rineka Cipta
- Christady Harry. 2015. *Pemeliharaan Jalan Raya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. S.P.2014. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: Grasindo
- Hasibuan, Malayu S.P 2014. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: Grasindo
- Iskandar.2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: Gaung Persada Press.
- Karyoto. 2016. *Dasar-Dasar Manajemen Teori dan Konsep*. Yogyakarta: Andi offset
- Mulyono.2016. *Manajemen Administrasi & Organisasi Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Narbuko Cholid & Abu Achmadi. 2008. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Rivai, Veitzhal, Muli Aman, Darmansyah, dan Mansyur Ramly. 2014. *Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi*. Jakarta: Rajawali Pres
- Pasalong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Siagian, Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi Edisi Revisi*, Jakarta. Bumi Aksara
- Syafie, Inu Kencana, 2003. *Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara

Siagian, P. Sondang. 2007. *OrganisasiKepemimpinanandanperilakuadminisrasi*.
Jakarta: CV Haji Masagung.

Siswanto, HB. 2005. *PengantarManagemen*. Jakarta: BumiAksara

Soekanto, Soerjono. 2014. *SosiologisuatuPengantar*. Jakara: RajawaliPres

Suhardono, 2011. *Pengantar dan Management*. Jakarta: GunungAgung

Tarmizi&HendryAndry. 2015, *PerilakudanEtikaAdmministrasiPublik*,Pekanbaru,
Universitas Islam Riau

Terry, G.R, 2015. *Prinsip-prinsipManajemen*. Jakarta, BumiAksara

Thoha, Miftah. 2011. *BirokrasiPemerintah Indonesia di Era Reformasi*.Jakarta:
Kencana.

Yussa H. A Tarmizi& Hendry Andry. 2015. *PerilakuEtikaAdministrasiPublik*.
Pekanbaru: MarpoyanTujuanPublinshing.

Zulkili,2005. *PengantarStudiIlmuAdministrasidanmanajemen*.Pekanbaru,
Universitas Islam Riau

Zulkifli&Nurmasari, 2015.*Dasar-Dasar IlmuOrganisasi*.Pekanbaru, Universitas
Islam Riau

Zulkifli&Yogia,Moris. 2014, *Fungsi-FungsiManajemen*, Pekanbaru, Universitas
Islam Riau

Zulkifli, 2009.*Fungsi-fungsi Manajemen*.Pekanbaru, UIR. Press

Dokumentasi

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi Dan Kerta Kerja Kerja Mahasiswa, 2013, Pekanbaru: UIR Pers

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum no. 13/Prt/M/2011 Tentang Cara Jalandan Penilaian Jalan.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Uraian Tugas Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.

Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 11 Tahun 2014
Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Indragiri Hilir





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 الجامعة الإسلامية الرiau

Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
 Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email. fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: 5005/A_UIR/FS-5/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama : Sri Ratna Putri
 Npm : 177110042
 Program Studi : Administrasi Publik
 Judul Skripsi : Pelaksanaan Tugas Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Pemeliharaan Jalan Di Kabupaten Indragiri Hilir (Studi Pada Bidang Bina Marga).

Persentase Plagiasi : 24 % (112 Halaman)

Status : **Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 4 November 2021

Hormat Kami,
 Wakil Dekan Bid. Akademik



Indra Safri, S.Sos., M.Si
 NPK. 970702230